



**Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

STUDI KASUS KOMUNIKASI KRISIS DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN POLITEKNIK



**STUDI KASUS
KOMUNIKASI KRISIS
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN POLITEKNIK**



**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

2023

**STUDI KASUS KOMUNIKASI KRISIS
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN POLITEKNIK
@2023**

- Pengarah : Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.
Saryadi, S.T., M.B.A.
- Penanggung Jawab : Eva Komalasari, S.T.
Cecep Somantri, Ph.D.
- Penyusun : Agung Sulistomo, S.E., M.M.
Kristiani, M.Pd.
Ratnasari Dewi, S.I.Kom.
Fauziannisa Pradana Putri
Dr. Dewi Yanti Liliana, M.Kom.
Anggun Gunawan, S.Fil., M.A.
- Tata Letak : Umi Muthiah
Dhoni Nurcahyo
- Sekretariat : Habib Prastyo, M.Pd.
Rina Yesicca Agustin, S.I.Kom.
Nora Siska Putri, S.Kom.
Dian Vita Nugrahaeny, S.I.Kom.
- Ukuran Buku : 148 mm x 210 mm
- Jumlah Halaman : 92 halaman
- ISBN :



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2 0 2 3



Kata Sambutan

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas yang sangat strategis. Salah satunya adalah mentransformasikan pendidikan vokasi di Indonesia agar bisa melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, unggul, dan berdaya saing. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi harus dapat memastikan relevansi lulusannya dengan tuntutan yang berkembang di dunia industri dan masyarakat.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk dapat membangun kerja sama dan kolaborasi yang strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik sesama instansi pemerintah maupun dengan sektor privat terkait, salah satunya adalah dengan dunia usaha dan dunia industri.

Dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan sangat berperan dalam mencapai berbagai rencana strategis yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam rangka menghadirkan lulusan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri serta tuntutan zaman ke depan.

Sebagai langkah awal, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tentu perlu untuk membangun reputasi yang baik/ positif di mata masyarakat dan di mata berbagai pemangku kepentingan. Jika reputasi positif telah dibangun, satu pintu untuk bekerja sama setidaknya sudah terbuka.

Sebagai rangkaian dari buku Komunikasi Krisis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kehadiran buku ini diharapkan bisa membantu unit-unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk bisa belajar bagaimana cara menghadapi situasi krisis yang bisa terjadi kapan saja. Hal paling penting dari buku ini adalah bagaimana kita bisa mengenali potensi-potensi krisis yang sekiranya bisa terjadi dan tindakan apa yang sebaiknya kita ambil untuk menyelesaikannya.

Direktur Jenderal,



Kiki Yulianti



Kata Pengantar

Ada konsensus kuat dari berbagai tulisan para praktisi dan akademisi yang menyebutkan bahwa reputasi adalah sumber daya organisasi yang tidak berwujud, tetapi sangat berharga bagi kelangsungan sebuah organisasi. Reputasi yang baik telah dikaitkan dengan berbagai manfaat seperti mengumpulkan lebih banyak komentar positif dan liputan positif. Hal itu pada akhirnya mampu meningkatkan kepuasan publik.

Akan tetapi, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini, publik atau masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi. Kanal-kanal informasi yang terbuka lebar dan tidak bisa sepenuhnya dikontrol telah membuat organisasi lebih rentan terhadap krisis. Di sisi lain, idiom *bad news is good news* telah begitu fasihnya di kalangan media dan menjadi PR tersendiri bagi sebuah organisasi atau instansi dalam upaya menjaga

reputasi, terlebih bagi instansi pemerintah dengan sorotan publik yang begitu kuat.

Media yang profesional mungkin akan memberitakan hal tersebut secara berimbang. Akan tetapi, banyak media yang justru mengambil kesempatan itu untuk menjualnya sebagai berita yang sensasional. Semua dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Di sisi organisasi, hal tersebut jelas akan menjadi krisis yang mengancam reputasi organisasi dan pimpinannya.

Oleh karena itu, kebutuhan akan komunikasi krisis yang efektif diperlukan untuk merespons berbagai krisis yang dihadapi dalam komunikasi organisasi. Dalam sebuah situasi krisis, tugas utama terletak pada bahu bidang humas dan publikasi.

Buku ini merupakan bagian dari seri buku Komunikasi Krisis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Buku ini menyajikan sejumlah peristiwa atau kejadian yang tidak “biasa” yang pernah terjadi di sejumlah satuan-satuan pendidikan vokasi. Meskipun tidak berkembang menjadi krisis yang hebat, beberapa studi kasus yang ditampilkan dalam buku ini dapat mengarah menjadi sebuah krisis komunikasi sehingga memerlukan penanganan yang cukup khas.

Buku ini menyajikan studi kasus peristiwa krisis yang pernah dihadapi oleh satuan pendidikan vokasi, mulai dari jenjang SMK hingga perguruan tinggi vokasi. Beberapa peristiwa yang diambil sebagai contoh dalam buku ini setidaknya sempat menjadi



pemberitaan yang gencar dan cukup “menghebohkan” media.

Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam buku ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang pernah dihadapi oleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatra Barat. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh berhasil meredam sentimen negatif dari pemberitaan tersebut dengan aksi responsif dan tegas yang ditunjukkan oleh pimpinan sehingga kasus ini tidak bergulir menjadi bulan-bulanan di media massa.

Meskipun hanya menampilkan empat kasus, kasus-kasus yang diangkat dalam buku ini dirasa cukup mewakili krisis-krisis yang sesungguhnya sangat dekat dengan keseharian dinamika organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Dari beberapa studi kasus yang ditampilkan di buku ini, kita dapat mempelajari bagaimana sebuah organisasi mengambil keputusan untuk menghadapi krisis yang terjadi di organisasi mereka. Dari buku ini juga kita akan belajar untuk terus mewaspadaai berbagai isu yang berisiko berkembang menjadi sebuah krisis.

Sekretaris,

Saryadi





Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
A. Kasus Satu (Menjerat Leher Dosen Vokasi)	1
Latar Belakang	3
Peristiwa	6
Pembaruan Peristiwa	7
Dampak Berita dan Level Krisis	8
<i>Wait and See the Issue</i>	11
Kesimpulan	17
B. Kasus Dua (Penghentian Pembangunan <i>Teaching Factory</i> SMK Perikanan dan Kelautan Puger)	19
Latar Belakang	22
Peristiwa	29

	Pembaruan Peristiwa	31
	Dampak Berita dan Level Krisis	33
	<i>Leadership is Key</i>	35
	Kesimpulan	41
C.	Kasus Tiga (Krisis Mengintai dari Kegiatan Magang)	43
	Latar Belakang	47
	Peristiwa	53
	Pembaruan Peristiwa	54
	Dampak Berita dan Level Krisis	56
	<i>Delay is Deadly</i>	58
	Kesimpulan	62
D.	Kasus Empat (Isu Pengangguran yang Terus Berulang)	63
	Latar Belakang	67
	Peristiwa	71
	Pembaruan Peristiwa	72
	Dampak Berita dan Level Krisis	73
	<i>Spread the Good News</i>	75
	Kesimpulan	79



Kasus Satu

“Menjerat Leher Dosen Vokasi”



Jakarta - Betapa gembira dosen vokasi melihat pengumuman yang bersebar di berbagai media sosial maupun situs internet bahwa pada tahun ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi meluncurkan Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perguruan Tinggi Vokasi Berbasis Industri Tahun 2022 melalui sertifikasi kompetensi dan magang industri.

Peningkatan Kompetensi SDM Perguruan Tinggi Vokasi melalui sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat diharapkan meningkatkan kompetensi dan wawasan atau pengalaman industri para dosen vokasi. Setelah program selesai, para dosen tersebut diharapkan juga membawa proses pembelajaran berkualitas sehingga turut menciptakan SDM unggul dan kompeten. SDM berkompoten dengan mindset terus berkembang dan berinovasi adalah kunci utama menguatkan sektor industri berdaya saing global.

Sasaran program adalah dosen perguruan tinggi negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bawah binaan Kemendikbudristek, yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tersebar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga yang berwenang memberikan sertifikat kompetensi yang dilaksanakan mulai awal Oktober hingga Desember 2022.

Di tengah minimnya peran serta pemerintah membersamai dosen meningkatkan kompetensi, program tersebut bagai setitik air di tengah padang pasir. Tuntutan dunia kerja kepada alumni perguruan tinggi vokasi yang semakin tinggi harus dibarengi peningkatan kompetensi dosen vokasi sebagai tulang punggung pemasok tenaga kerja terampil ke industri.

Kalau ada yang mengatakan dosen Indonesia malas-malas dan tak mau belajar. Fakta itu terbantahkan dengan tingginya animo dosen vokasi mendaftar sebagai peserta program. Beribu dosen vokasi mendaftarkan diri sebagai bukti komitmen kepada profesi dosen. Lebih dari empat ribu pendaftar melamar, namun hanya 744 dosen vokasi yang dinyatakan lolos. Untuk skema luar negeri, terpilih 194 dosen vokasi dari PTN dan PTS yang akan melaksanakan program di 13 perguruan tinggi serta industri di LN. Sedangkan sisanya mengikuti sertifikasi kompetensi berdurasi waktu seminggu dan magang industri selama dua bulan.

Pengorbanan para peserta program yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia tersebut sangat besar. Mereka berangkat dari Sabang hingga Merauke, meninggalkan keluarga demi masa depan generasi bangsa. Pengorbanan mereka tak bisa dibandingkan dengan lembaran rupiah yang didapat. Seorang dosen dari Politeknik Negeri Fakfak yang mengikuti sertifikasi kompetensi di Bandung misalnya. Untuk bisa sampai ke Bandung saja, dia harus menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara sekaligus supaya sampai ke tujuan. Dia harus menguras kocek dalam-dalam agar bisa mengikuti pelatihan.

Apalagi fakta bertutur janji pemerintah akan memberikan uang transportasi dan biaya hidup (*living cost*) sebesar Rp4.300.000 per bulan kepada peserta magang tak kunjung dicairkan hingga kini. Sebenarnya biaya hidup sebesar itu tak memadai bagi peserta karena mencakup biaya tempat tinggal, transportasi selama pelatihan, dan konsumsi, minim. Sudahlah tak memadai, sampai sekarang belum ada tanda-tanda dari pemerintah kapan biaya hidup dan uang transport cair.

Praktis, semua biaya ditanggung sendiri oleh peserta program. Bahkan peserta sertifikasi kompetensi yang sudah menyelesaikan pelatihan pun hingga kini tak kunjung mendapat kepastian kapan uang mereka diganti. Padahal mereka meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran bukan sebentar, dua bulan. Mereka berangkat dari kota asal menggunakan uang pribadi dan membiayai sendiri kebutuhan selama magang.

Anda bisa bayangkan dosen di Indonesia yang berpendapatan pas-pasan harus menanggung seluruh biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan lain-lain. Bagaimana pula dengan dosen swasta yang sebagian besar pendapatannya



masih jauh dari dosen PNS. Pastilah mereka kalang kabut dengan keterlambatan tersebut. Dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada program ini pun tidak menjamin dana pengembangan profesi dosen lebih besar dan mudah cair.

Cobalah bandingkan dengan pelatihan para pegawai instansi plat merah lain dan BUMN. Bukan saja uang transportasi dan biaya hidup mereka jauh melampaui para dosen. Mereka pun tinggal di tempat yang representatif, seperti hotel dan villa ketika mengikuti pelatihan. Sudah bukan rahasia umum banyak instansi menjelang penutup akhir tahun menghabiskan sisa dana untuk berbagai pelatihan yang tidak begitu penting.

Pemerintah harus menyadari bahwa pendapatan dosen di Indonesia masih jauh dari harapan. Membandingkan pendapatan dosen dengan pegawai plat merah lain, apalagi dengan pegawai BUMN bagai jauh panggang dari api. Dosen PNS yang golongan III D dengan masa kerja 20 tahun bergaji Rp4.700.000 ditambah dengan sertifikasi sekitar Rp3.400.000. Itulah pendapatan dosen di Indonesia. Pendapatan itu sudah mencakup semuanya, termasuk penelitian, pengabdian masyarakat, menulis artikel ilmiah ke jurnal nasional dan internasional yang membutuhkan biaya besar.

Pemerintah harus menyadari bahwa profesi dosen bukan mentereng, sehingga perlu segera mengalirkan hak dosen pada program sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat dosen vokasi. Keterlambatan membayarkan hak mereka sama saja menjerat leher dosen vokasi secara perlahan-lahan. Kegembiraan dosen vokasi meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri demi kemajuan dunia industri negeri ini bisa menjadi kesedihan.

Ayo, Pak Nadiem Makarim... buat dosen vokasi bergembira demi pendidikan vokasi lebih berkualitas dan berkompeten!

Dr. Arfanda Siregar, M.SI dosen Politeknik Negeri Medan, doktor Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (Vokasi), peserta Program Sertifikasi kompetensi dan Magang Industri Bersertifikat Dosen Vokasi.

Latar Belakang

Dosen memiliki peran penting dalam transformasi pendidikan vokasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kompetensi yang dimiliki, para dosen menjadi salah satu faktor penting untuk melahirkan lulusan vokasi yang unggul dan berkualitas.

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan vokasi adalah melalui Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perguruan Tinggi Vokasi Berbasis Industri yang diluncurkan

pada Mei 2022. Program tersebut dikelola oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Dalam implementasinya, upaya peningkatan kompetensi dosen melalui program tersebut dilakukan melalui Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat bagi pada dosen vokasi maupun tenaga kependidikan di perguruan tinggi vokasi serta magang industri, baik di industri dalam negeri maupun industri yang berada di luar negeri.

Sebagai salah satu program prioritas, Program Peningkatan Kompetensi SDM Perguruan Tinggi Vokasi Berbasis Industri tahun 2022 sepenuhnya dibiayai melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program tersebut tidak hanya menasar para dosen di perguruan tinggi negeri, tetapi juga dosen perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang memenuhi persyaratan.



Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki empat skema yang dapat dipilih oleh para calon penerima program. Skema pertama adalah Sertifikasi Kompetensi. Skema ini bertujuan untuk mendukung proses pemberian pelatihan hingga sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi secara sistematis dan objektif, mengacu pada standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional dan internasional. Skema ini memberikan kuota sebanyak 300 dosen untuk sertifikasi kompetensi dalam negeri dan 50 dosen sertifikasi kompetensi luar negeri.

Skema kedua adalah Sertifikasi Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (Pekerti) dan/atau Pendekatan Aplikatif (AA). Kapasitas pendanaan dalam skema ini adalah 90 orang dosen, yakni 50 bagi sertifikasi dalam negeri dan 40 bagi program sertifikasi luar negeri.

Skema selanjutnya adalah melalui Sertifikasi Magang Industri Bersertifikat. Skema ini menargetkan keterlibatan

industri swasta atau BUMN/BUMD berukuran menengah ke atas yang berada di dalam atau luar negeri dengan syarat memiliki afiliasi dengan kompetensi program studi.

Skema terakhir adalah melalui Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) Unggul Bereputasi Global. Dalam skema ini, pemerintah mengirimkan dosen PTPPV untuk magang ke perguruan tinggi luar negeri yang memiliki reputasi dan keunggulan teknologi lebih unggul dari PTPPV pengusul.

Peristiwa

Awal krisis ini bermula dari tulisan opini dosen Politeknik Negeri Medan, Dr. Arfanda Siregar, M.Si., yang dipublikasikan di kolom opini Detik.com pada Rabu, 7 Desember 2022. Arfanda merupakan salah satu peserta Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Industri Bersertifikat tahun 2022 dan sudah menyelesaikan programnya.

Dalam artikel tersebut, Arfanda mengungkapkan kekecewaan atas pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi SDM Perguruan Tinggi Vokasi Berbasis Industri Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.

Dalam opini yang kemudian dijadikan sebagai berita tersebut, Arfanda merasa dirinya dan 744 dosen vokasi

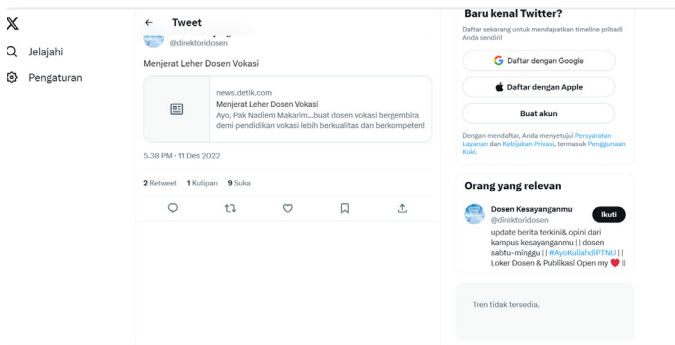


yang terpilih untuk mengikuti program tersebut di Bandung tidak dihargai. Janji pemerintah yang akan memberikan uang transportasi dan biaya hidup (*living cost*) sebesar Rp4.300.000,00 per bulan kepada peserta magang, termasuk dirinya tidak kunjung dicairkan meskipun kegiatan sertifikasi dosen tersebut telah berakhir.

Dalam artikel opini tersebut, Arfanda tidak hanya mengeluhkan janji uang transportasi dan biaya hidup itu yang belum cair, tetapi juga nominal biaya yang dinilai tidak sepadan. Arfanda menggambarkan jika banyak peserta yang terpaksa harus menguras tabungan mereka untuk biaya selama pelatihan tersebut.

Pembaruan Peristiwa

Setelah Detik.com mengunggah opini Arfanda Siregar di kanal Detiknews, berita tersebut kemudian diunggah ulang melalui akun Twitter @duniadosen. Unggahan akun @duniadosen muncul empat hari sejak berita tersebut diunggah oleh Detik.com, yakni pada 11 Desember 2022.



Dampak Pemberitaan dan Level Krisis

Jika melihat reaksi publik terhadap pemberitaan tersebut, masyarakat pada dasarnya tidak terlalu memberikan reaksi berlebihan. Hal tersebut terlihat dari pembicaraan tentang kasus Dosen Arfanda di ruang-ruang publik termasuk media sosial tidak terlalu ramai. Bahkan, ketika berita tersebut diunggah di Twitter oleh akun @duniadosen, berita tersebut hanya direspons oleh sedikit orang, hanya dua akun yang kemudian melakukan *retweet*. Padahal, akun pengunggah merupakan akun komunitas dosen yang menjadi profesi dari narasumber.

Meskipun tulisan bernada ketidakpuasan dan bersifat opini tersebut tidak terlalu menarik perhatian publik, pemberitaan tentang ketidakpuasan dosen tersebut bisa jadi akan memberikan dampak yang mengarah pada reputasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di mata publik.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau dalam tataran yang paling tinggi yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dianggap kurang profesional dalam mengelola program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para dosen tersebut.

Tidak hanya bisa mengancam citra atau nama baik Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saja, munculnya pemberitaan tersebut juga akan berdampak pada kredibilitas



program-program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi lainnya.

Sebagai sebuah unit baru di Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan dipersepsikan publik dengan sentimen negatif melalui pemberitaan tersebut. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan dinilai tidak profesional dan tidak bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kompetensi dosen vokasi yang menjadi ujung tombak bagi peningkatan dan keberhasilan transformasi pendidikan vokasi yang sedang dalam digalakkan.

Dalam tataran yang lebih ekstrim, cerita tentang ketidakpuasan peserta program malah dapat menggiring pada opini atau persepsi publik bahwa setiap program yang dibuat oleh pemerintah tidak serius. Hal ini tentu dapat menggerus citra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di masa publik.

Tidak hanya berdampak pada persepsi publik, jika tidak diluruskan, sentimen negatif tersebut bukan tidak mungkin dapat membuat industri malas untuk bekerja sama dan mendukung setiap program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Jika merujuk pada tahapan krisis menurut Buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), kasus pemberitaan “Menjerat Leher Dosen Vokasi” bisa dikatakan masuk dalam tahapan

Pra-Krisis. Pada tahap ini biasanya ditandai dengan munculnya tanda-tanda sebelum krisis benar-benar muncul. Sejumlah tanda-tanda yang muncul dalam kasus ini adalah ketidakpuasan dosen yang kemudian dituangkan dalam opini. Opini dosen yang kemudian diunggah di Detik.com tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan yang muncul di media sosial dan forum-forum (forum dosen, red).

Meskipun demikian, tanda-tanda krisis yang muncul terkesan belum terlalu mengancam operasional organisasi (Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi). Terlebih, media-media besar tidak turut memberitakan kasus ini. Kasus “Menjerat Leher Dosen Vokasi” lebih banyak muncul di ruang media sosial dan menjadi bahasan di komunitas.

Oleh karena itu, jika merujuk pada buku Komunitas Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), kasus pemberitaan “Menjerat Leher Dosen Vokasi” dapat dimasukkan dalam kategori krisis yang ringan. Pemberitaan ini tidak terlalu menjadi bahan perbincangan di ruang-ruang publik dan masyarakat. Perbincangan tentang menjerat leher dosen vokasi hanya berputar di komunitas.

Meskipun demikian, dampak dari pemberitaan ini tetap tidak bisa dikesampingkan karena bukan tidak mungkin peristiwa ini juga dapat memicu krisis jika tidak ditangani dengan bijak.



Wait and See the Issue

Merujuk pada Buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), kita mengenal apa yang disebut sebagai parakrisis yakni jenis tanda peringatan krisis tertentu. Akan tetapi, parakrisis juga menyerupai krisis itu sendiri karena bisa saja mengancam reputasi organisasi. Parakrisis tidak memerlukan aktivasi tim krisis dan tidak mengganggu organisasi. Meskipun demikian, parakrisis perlu mendapatkan perhatian karena kelalaian dalam pengelolaannya bisa saja menciptakan krisis yang sesungguhnya.

Meskipun tidak mengganggu organisasi secara umum, sebagai konsekuensi dari organisasi serta bagian dari sistem sosial yang lebih besar, organisasi yang sukses tentu harus memperhatikan dinamika yang terjadi dalam setiap kegiatan operasional sehari-hari organisasi tersebut, termasuk soal kasus opini “Menjerat Leher Dosen Vokasi”.

Isu-isu apa saja yang terjadi atau berpotensi terjadi tidak boleh luput dari perhatian begitu saja. Tidak peduli apakah isu besar atau kecil yang ada di masyarakat, surat kabar, dan media sosial maka isu-isu tersebut tetap harus dipantau dan diantisipasi, terlebih jika isu tersebut memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.

Jika organisasi gagal mengantisipasi sebuah isu, ada kemungkinan isu tersebut bergerak liar dan tidak terkontrol

hingga mengakibatkan munculnya krisis.

Dalam kasus pemberitaan “Menjerat Leher Dosen Vokasi”, jika dilihat dari keriuhan berita tersebut di publik memang tidak terlalu besar. Tidak banyak media yang mengutip ulang tulisan tersebut atau mencoba mengonfirmasi langsung, baik ke dosen, peserta program lain, atau bahkan ke Direktorat Pendidikan Vokasi dalam hal ini adalah Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Kemendikbudristek.

Dengan demikian, meskipun bibit isu pemberitaan tersebut bisa berpotensi menjadi krisis, sebagai sebuah organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi belum bisa dikatakan dalam kondisi krisis. Biasanya, sebuah organisasi dikatakan dalam kondisi krisis ketika ia menghadapi sebuah peristiwa yang dapat mengganggu kelancaran operasional atau berpotensi mencemarkan reputasi dan kredibilitas organisasi (Argenti, 2003).

Dalam contoh kasus ini, pemberitaan “Menjerat Leher Dosen Vokasi” pada dasarnya bersumber dari isu di internal organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (perguruan tinggi vokasi), di mana akarnya adalah ketidakpuasan dosen akan pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Dosen.

Jika mengacu pada Argenti (2003), pada dasarnya pemberitaan tentang ketidakpuasan dosen peserta Program



Sertifikasi Kompetensi dan Magang Industri Bersertifikat tahun 2022 tersebut secara kasat mata tidak mengganggu kelancaran operasional Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa program serupa masih mendapat respons baik dari para dosen ketika dibuka kembali di tahun 2023.

Menu Berlangganan Daftar

Belan

PENDIDIKAN VOKASI

Dosen Vokasi Mendapat Beasiswa Magang dan Sertifikasi

Ekosistem pendidikan vokasi Indonesia terus dikuatkan untuk menyiapkan tenaga kerja dan "entrepreneu" yang selaras dengan kebutuhan industri. Untuk itu, kompetensi dan sertifikasi pendidik vokasi harus ditingkatkan.

Audio Berita 5 menit

Oleh ESTER LANCE HARTUPALU
25 April 2023 17:57 WIB · 4 menit baca

A TBS

Meskipun tidak mengganggu kegiatan operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, termasuk Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, pemberitaan bernada negatif tersebut tetap memiliki potensi yang mengancam reputasi dan kredibilitas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai pelaksana program. Dalam kaitan yang lebih luas, kekecewaan dosen tersebut juga bisa saja berpotensi untuk memancing ketidakpuasan lain atas program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, utamanya di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Jika mengacu pada penyebabnya, potensi krisis yang

ditimbulkan dari pemberitaan tersebut pada dasarnya disebabkan bukan dari bencana alam yang memang sulit untuk dielakkan. Potensi krisis yang timbul dari pemberitaan tersebut lebih disebabkan oleh ulah manusia, yakni ketidakpuasan dosen terhadap Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Industri Bersertifikat tahun 2022, di mana uang transportasi dan biaya hidup sebesar Rp4.300.000,00 per bulan kepada peserta magang tak kunjung dicairkan.

Sebagai sebuah potensi krisis yang bersumber dari ulah manusia, maka bisa dikatakan isu ketidakpuasan ini tidak akan serta merta berubah menjadi krisis. Isu tersebut akan berkembang mengikuti sebuah pola bertahap. Tahap-tahap itu sebenarnya juga dapat diprediksi sebelumnya, diperkecil dampak kerusakannya, bahkan bisa dicegah agar tidak berkembang ke tahap-tahap selanjutnya.

Krisis yang disebabkan oleh ulah manusia biasanya diawali oleh semacam peringatan dini yang mendahuluinya. Semacam “tanda-bahaya” munculnya sebuah isu, ungkapan rasa tidak puas, dugaan oleh pihak tertentu tentang produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, atau terjadinya peristiwa-peristiwa kecil yang disepelekan atau diremehkan. Jika tidak dikelola dengan cara yang tepat bisa saja hal itu akan meningkat menjadi sebuah isu terbuka. Ini dikatakan terbuka karena isu dibicarakan tidak lagi terbatas pada lingkungan kampus, Direktorat Kelembagaan dan Sumber



Daya Pendidikan Tinggi Vokasi ataupun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Suka tidak suka, ketidakpuasan tersebut telah beredar di masyarakat melalui liputan media massa serta turut disuarakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui Twitter. Pada akhirnya isu ini mengarahkan organisasi untuk mengintervensi isu dan membawanya pada tahap penyelesaian dengan cara terbaik. Sebagai sebuah “tanda-bahaya”, siapa pun yang diberi tanggung jawab dalam organisasi untuk menangani isu ini harus segera mengendalikannya dan mencegahnya agar tidak menimbulkan krisis.

Dalam kasus “Menjerat Leher Dosen Vokasi” ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi lebih memilih strategi membiarkan isu tersebut tenggelam dengan sendiri. Dalam banyak kasus komunikasi krisis, diam kerap menjadi bumerang yang bisa menyerang balik organisasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi dituntut untuk cepat bereaksi dalam merespons isu.

Akan tetapi, terkadang tidak selamanya diamnya organisasi berdampak fatal. Sebagai contoh dalam kasus “Menjerat Leher Dosen Vokasi” ini. Meskipun skala media yang memberitakan cukup besar, berita tersebut tidak sempat menjadi bahan perbincangan publik, atau bahkan di kalangan komunitas dosen itu sendiri.

Oleh karena itu, strategi diam yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Vokasi ini cukup efektif untuk mengatasi pemberitaan negatif dari media ini. Tentu saja, sebagai organisasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tetap harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pemberitaan negatif serupa di lain waktu serta mempersiapkan strategi lain untuk mengantisipasinya.

Strategi antisipasi tersebut penting, apalagi jika dilihat bahwa kasus tersebut bersumber dari krisis internal, yakni isu ketidakpuasan personal di dalam internal sebuah organisasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ada banyak isu yang dapat berpotensi menjadi krisis dalam internal, seperti ketidakpuasan pegawai, perasaan tidak dihargai, program yang tidak dirancang matang, dan sebagainya. Dalam konteks pemerintahan, bibit-bibit isu yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi krisis salah satunya memang bisa berasal dari program-program, terutama program yang tidak dirancang dengan baik.

Meskipun tidak berkembang menjadi krisis, hal terbaik yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh dinamika dari isu-isu yang muncul dan berkembang di masyarakat. Adanya sebuah sistem analisis dan *monitoring* berita dalam sebuah organisasi merupakan sebuah keharusan untuk memantau pergerakan isu sehingga organisasi dapat memutuskan kapan saatnya diam dan kapan saatnya harus bertindak dengan keluar



memberikan keterangan atau pernyataan kepada media untuk menjawab pemberitaan dan isu-isu negatif terkait organisasi.

Kesimpulan

Dalam banyak kasus, kerap kali sumber krisis justru berasal dari internal. Salah satunya adalah seperti dalam kasus “Menjerat Leher Dosen Vokasi” ini. Meskipun dampak dari pemberitaan ini relatif kecil dan pemberitaan di media massa juga tidak terlalu masif, jika tidak ditangani dengan baik bisa saja ini akan menjadi bibit-bibit potensi yang meletup di lain waktu.

Oleh karena itu, sebuah manajemen krisis yang efektif adalah jika organisasi melakukan tindakan dengan dasar meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap internal maupun bagi publik. Di samping itu, perlu juga untuk memadukannya dengan proses manajemen isu dan mengelolanya dengan baik.

Dengan kata lain, strategi untuk *wait and see* bisa saja diterapkan untuk mengatasi krisis di masa pra-krisis dalam level yang ringan. Aplikasi dari strategi tersebut dapat dilakukan dengan memantau dengan seksama pada setiap perkembangan yang terjadi dalam kasus krisis yang dihadapi. Salah satunya adalah dengan menguatkan sistem analisis dan *monitoring* berita.





Kasus Dua “Penghentian Pembangunan *Teaching Factory* Tambak Udang SMK Perikanan dan Kelautan Puger”



Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghentikan pembangunan tambak Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Puger, di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Tambak yang sedianya

untuk laboratorium praktik siswa ini belum mengantongi izin.

Camat Gumukmas Nino Eka Putra mengatakan, beberapa waktu lalu tim dari Dinas Perikanan dan Kelautan memasang papan sosialisasi mengenai tambak di Kepanjen. Pemkab Jember memang tengah getol menertibkan tambak ilegal dan mensosialisasikan larangan membangun tambak di sempadan pantai.

“Mereka (SMK Perikanan dan Kelautan) proses membangun tambak tapi belum ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” kata Nino, ditulis Kamis (22/9/2022).

Saat itu, ada alat berat pengeruk tanah sedang beroperasi. Tim patroli kecamatan pun meminta agar aktivitas itu dihentikan.

Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kuntjoro Dhiyauddin membenarkan pihaknya sedang membangun *teaching factory* agrobisnis perikanan laut dan payau sejak 23 Agustus 2022. Dia mengaku telah menjelaskan program pembangunan tersebut kepada Bupati Jember, Hendy Siswanto.

“Istilahnya bukan tambak, tapi *teaching factory*. Itu pembelajaran berbasis industri yang wajib dilakukan SMK. Dengan pembelajaran *teaching factory* itu, industri hadir di tengah SMK untuk mendesain kurikulum, menyiapkan sarana dan prasarana praktik, sehingga anak-anak kompeten betul sesuai tuntutan dunia kerja, dunia industri,” kata Kuntjoro.

Menurut Kuntjoro, *teaching factory* tersebut adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 19 Tahun 2016. “Seluruh kementerian dan pemerintah daerah mendukung program kerjasama SMK dengan industri, supaya lulusan SMK benar-benar sesuai tuntutan industri,” katanya.

Luas *teaching factory* tambak tersebut sekitar 5.900 meter persegi. “*Teaching factory* itu didesain dan direncanakan sebagaimana petunjuk teknis budidaya udang yang benar dengan kaidah-kaidah keilmuan. Itu diterapkan betul supaya anak-anak punya kapasitas, kemampuan, kompetensi di bidang itu. Supaya kalau jadi petambak, jadi petambak yang benar,” kata Kuntjoro.

Para siswa SMK Perikanan dan Kelautan Puger mendapat bimbingan dari staf ahli menteri dan enam instruktur dari perguruan tinggi. Para siswa akan belajar bagaimana memilih dan mendesain lahan dan membuat konstruksi.

“Jadi ada kurikulumnya. Perencanaan sudah, mendesain dan membuat konstruksi sudah. Sekarang melaksanakan pembuatan konstruksi. Namanya intensifikasi, tidak boleh ada yang terlewat, sehingga setiap hari anak-anak mengikuti berbagai proses sekecil apapun. Tak boleh tertinggal, karena ini proses yang harus dipahami anak-anak,” kata Kuntjoro.

Bagaimana dengan proses perizinannya? “Karena ini *teaching factory* untuk kepentingan pemberdayaan kapasitas kemampuan anak-anak, kami mohon bupati memberikan fasilitas percepatan izin-izin kegiatan ini,” kata Kuntjoro.

Kuntjoro sudah bertemu Pemkab Jember untuk memberi penjelasan pada Selasa (20/9/2022). “Kalau perlu, kami dibantu, bagaimana ketika anak-anak belajar mendirikan tambak punya pengalaman mengurus perizinannya juga. Kami ajari,” katanya.

Para siswa SMK Puger juga akan diajari proses ekspor udang vaname budidaya dalam *teaching factory* tersebut. “Paska-panen seperti apa, ada pelajarannya. Jadi harus berhasil. Masa mengajari anak-anak harus mengajari berhasil,” kata

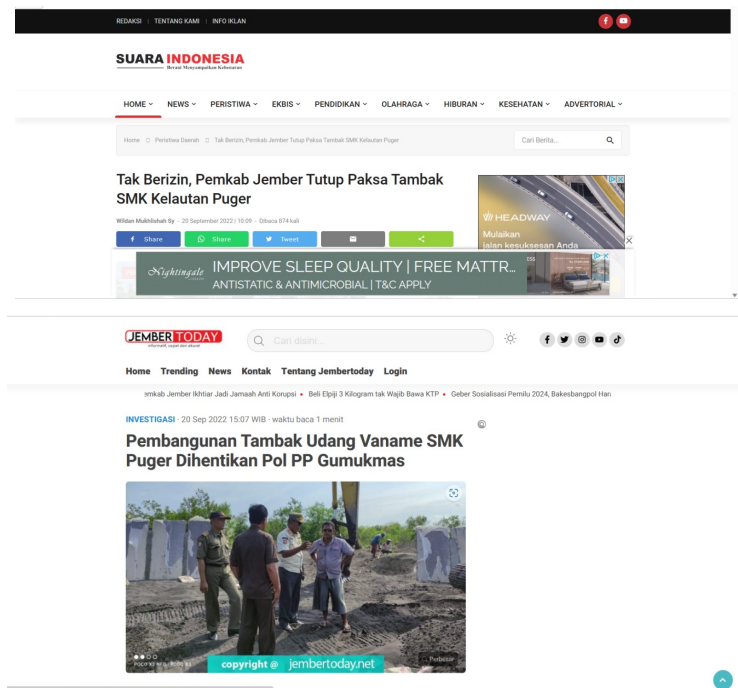


Kuntjoro.

Kuntjoro senang, Bupati Hendy Siswanto menyambut baik rencana SMK Perikanan dan Kelautan. “Pak Hendy sendiri ingin sejak dulu tambak di utara jalan, bukan di selatan jalan (sempadan pantai). Kami hadir di situ juga memberi contoh bagaimana tambak yang benar bukan di sempadan. Yang benar (tambak dibangun) di utara jalan, bukan di atas sempadan yang notabene tanah negara,” katanya.

“Artinya kami sungguh-sungguh ingin memberikan contoh yang benar. Bagaimana mengolah Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah), kami bersama Universitas Brawijaya. Tidak main-main. Tambak-tambak yang ada tidak pakai ipal. Kami pakai ipal, yang mendampingi dan mendesain adalah Pusat Studi Kelautan Unibraw. Jadi kami ingin memberi contoh yang benar, karena ini *teaching factory*,” kata

Kuntjoro. [wir/beq]





Latar Belakang

Sebagai upaya transformasi pendidikan vokasi untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), Kemendikbudristek pada tahun 2021 meluncurkan program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan ini menjadi bagian dari Merdeka Belajar episode ke-8 yang diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Program SMK Pusat Keunggulan ini sekaligus merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Program SMK Pusat Keunggulan secara khusus bertujuan menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui penyelarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Upaya untuk mewujudkan keselarasan antara SMK dan dunia kerja dan dunia industri tersebut dapat ditempuh melalui pemenuhan delapan aspek *link and match* sebagai berikut.



Pertama, kurikulum disusun bersama oleh sekolah dan industri agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis proyek nyata dari dunia kerja (*project based learning*). Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Mendikbudristek menegaskan, pengajaran oleh pakar ini ditingkatkan secara signifikan sampai minimal mencapai 50 jam per semester per program keahlian.

Keempat, adanya praktik kerja lapangan atau di industri minimal satu semester. Kelima, lulusan dan guru atau instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, guru atau instruktur perlu memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, dilakukan riset terapan yang mendukung jalannya proses belajar mengajar berdasarkan kasus atau kebutuhan riil industri.

Kedelapan, adanya komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Kemendikbudristek juga mendorong agar kolaborasi dengan dunia kerja dapat semakin ditingkatkan, di antaranya melalui kemungkinan kerja sama beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, dan lainnya.

Program ini tidak hanya menekankan konteks keunggulan untuk satuan pendidikan itu sendiri. Namun, lebih dari itu, maknanya adalah menciptakan SDM unggul yang mengakselerasi SMK lain untuk turut menjadi unggul. Sekolah yang terpilih dalam program SMK Pusat Keunggulan

diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya.

Program SMK Pusat Keunggulan mengusung semangat Merdeka Belajar yang berfokus pada penguatan SDM serta mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan selarasnya kualitas hasil belajar siswa dengan standar dunia kerja.

Untuk itu, Kemendikbudristek menyiapkan enam bentuk dukungan. Pertama, penguatan SDM (kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah) melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Kedua, pembelajaran kompetensi dan pembentukan karakter yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Ketiga, bantuan dana hibah untuk penguatan sarana belajar praktik bagi siswa. Keempat, pendampingan terkait manajemen sekolah berbasis data agar lebih efisien. Kelima, pendampingan oleh perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem yang lebih terkoneksi. Keenam, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dukungan penyelenggaraan SMK yang berkelanjutan.

Guna menyukseskan program SMK Pusat Unggulan, Kemendikbudristek mengajak pemerintah daerah dan industri untuk turut memantau dan mengevaluasi penyelenggaraannya. Kemendikbudristek melalui Direktorat



Jenderal Pendidikan Vokasi terus melakukan transformasi pendidikan SMK di Indonesia. Salah satu program yang akan kembali diselenggarakan pada tahun 2023 adalah Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD).

Program SMK PK SPD merupakan mekanisme pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri yang didukung oleh pendanaan dari APBN dan investasi DUDI. Kemendikbudristek akan memadankan investasi dari industri 1:1, di mana plafon pendanaan maksimal yang diberikan pemerintah adalah Rp3 miliar. Melalui program SMK PK SPD diharapkan akan terjalin kemitraan yang lebih terukur antara DUDI dengan SMK.

SMK Perikanan dan Kelautan Puger

SMK Perikanan dan Kelautan Puger terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Daerah ini dikenal sebagai salah satu kawasan pesisir selatan Jawa Timur.

SMK Perikanan dan Kelautan Puger berdiri sejak tahun 2000 dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darsul Bihar Jember. Saat ini SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember memiliki 5 (lima) kompetensi keahlian unggulan dan terfokus di bidang kemaritiman, yaitu Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Agriteknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknik Kapal

Penangkapan Ikan, Agribisnis Perikanan, dan Teknik Konstruksi Kapal

Sepak terjang sekolah ini sudah cukup baik di mata masyarakat sekitarnya. Para siswanya tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember saja, tetapi juga kabupaten lain seperti Lumajang, Bondowoso, Situbondo, bahkan dari provinsi lain.

Tidak hanya itu, SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember ini juga memiliki relasi yang cukup baik dengan sejumlah mitra industri yang selama ini bekerja sama dengan sekolah dalam banyak aspek. Tercatat, setidaknya lebih dari 80 institusi, baik DUDI maupun perguruan tinggi dalam maupun luar negeri yang bermitra dengan SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Dengan akreditasi A dan sudah mengantongi sertifikat ISO sejak tahun 2010 (ISO 9001:2015), SMK ini sudah lolos verifikasi dewan penguji keahlian pelaut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak tahun 2008 serta lolos verifikasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk uji keahlian penangkapan ikan dan uji ahli mesin penangkapan ikan.

Sebagai SMK rujukan kemaritiman sejak tahun 2015, SMK Perikanan dan Kelautan Puger pernah ditunjuk sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Keahlian Ganda se-Indonesia tahun 2017. SMK ini telah memiliki sertifikat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2016



untuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). SMK ini juga beberapa kali mengikuti *event*, baik seminar pendidikan, pertukaran pelajar, dan lomba di beberapa negara, antara lain di Thailand, Filipina, Cina dan Jepang.

SMK Perikanan dan Kelautan Puger melaksanakan pendidikan karakter sejak tahun 2000, antara lain melalui Latihan Dasar Disiplin Korps (LDDK) taruna dan praktik baik pembentukan dan penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5BK) dengan sistem semi taruna dan kepesantrenan, sinergi *link and match* bersama industri, dan uji sertifikasi untuk taruna berstandar nasional dan internasional.

Sejak 2015 SMK Perikanan dan Kelautan Puger terus bertransformasi melalui pembelajaran berbasis *Teaching Factory* (Tefa). Pada tahun 2021 SMK Perikanan dan Kelautan Puger ditunjuk oleh Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek sebagai salah satu SMK pelaksana program SMK Center of Excellence (CoE) dan kemudian berlanjut menjadi SMK Pusat Keunggulan.

Sekolah ini mengembangkan sejumlah Tefa, mulai dari Tefa aneka olahan hasil ikan dan laut, kapal penangkap ikan *fiberglass*, hingga yang terbaru adalah tambak udang vaname yang mulai dirintis sejak 2022 lalu melalui program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan.

Tefa tambak udang vaname ini merupakan salah satu Tefa

untuk Program Studi Agribisnis Perikanan Payau Laut. Tambak udang vaname ini menggandeng PT Istana Cipta Sembada yang tidak lain merupakan salah satu mitra SMK Perikanan dan Perikanan Puger.

Melalui program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan 2022, SMK Perikanan dan Kelautan Puger merintis pembangunan Tefa tambak udang Vaname di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember. Nilai investasi tambak ini mencapai Rp3,5 miliar yang berasal dari pemadanan industri dan juga pemerintah.

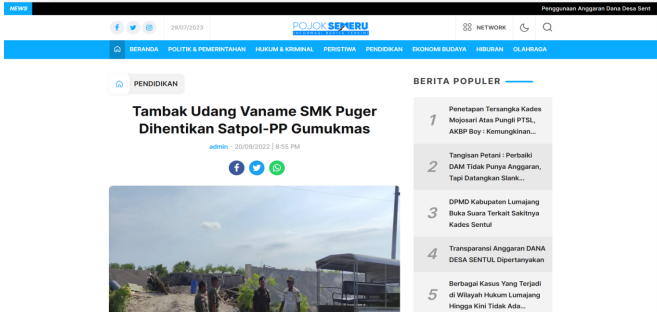
Tefa berupa budi daya udang vaname ini memanfaatkan lahan tidur milik warga dusun. Lokasinya berada di sebelah utara jalur lintas selatan Jember sehingga lahan tersebut dipastikan tidak berada pada sempadan pantai. Oleh mitra industri, lahan tidur milik warga ini dibeli dan diwakafkan kepada Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darsul Bihar Jember yang menaungi SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Selain dibeli ada juga lahan yang disewa dari warga sekitar lokasi tambak.

Tefa berupa tambak udang vaname memiliki 3 kolam produktif dengan luas ketiga kolam 4.823 m² dengan daya tampung udang pada kolam 1 sejumlah 255.300 ekor, kolam 2 sejumlah 255.300 ekor, dan kolam 3 sejumlah 212.850 ekor. Jika ditotal tambak tersebut mampu menampung setidaknya 700.000 ekor udang.



Peristiwa

Pada 20 September 2022, salah satu portal berita lokal, PojokSemeru membuat laporan dengan judul “Tambah Udang Vaname SMK Puger Dihentikan Satpol PP Gumukmas”



Berita yang diunggah pada pukul 08.55 tersebut memuat *statement* dari Camat Gumukmas, Nino Eka Wahyu Ramadhoni, yang membenarkan adanya perintah kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Gumukmas untuk menghentikan pembangunan tambak udang vaname milik SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Kecamatan Gumukmas merupakan lokasi pembangunan tambak udang vaname tersebut.

“Memang benar Satpol PP kami bersama tim dari penertiban Aset Pemkab menghentikan pembangunan tambak milik SMK Perikanan dan Kelautan Puger,” ucap Nino. (Pojok Semeru/20/9/2022)

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa pembangunan tambak tersebut belum mengantongi izin resmi dan berada di kawasan sempadan pantai.

Di hari yang sama, sejumlah portal berita ikut memberitakan peristiwa penyegekan pembangunan tambak udang

vaname SMK Perikanan dan Kelautan Puger karena belum mengantongi izin resmi dan berada di kawasan sempadan pantai. Misalnya portal berita Suara Indonesia yang menurunkan berita berjudul “Tak Berizin, Pemkab Jember Tutup Paksa Tambak SMK Kelautan Puger” pada pukul 10.09.

Portal berita lain yang menurunkan berita yang sama di hari yang sama adalah *JemberToday* yang menurunkan berita “Pembangunan Tambak Udang Vaname SMK Puger Dihentikan Pol PP Gumukmas”. Berita tersebut turun di hari yang sama, pada pukul 15.07.

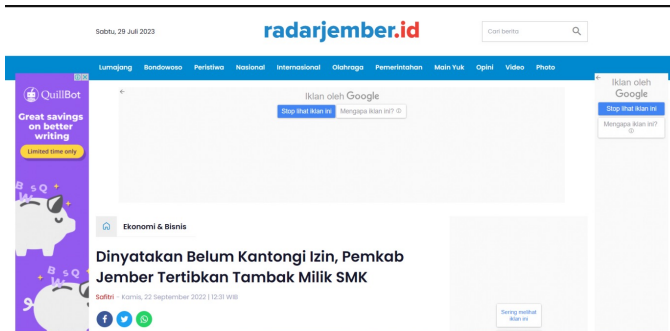
The image displays two screenshots of news websites. The top screenshot is from **SUARA INDONESIA**, featuring a navigation bar with categories like REDAKSI, TENTANG KAMI, and INFO ILMAN. The main article is titled "Tak Berizin, Pemkab Jember Tutup Paksa Tambak SMK Kelautan Puger" and is dated 20 September 2022 at 10:09. It includes social media sharing buttons and a "Fokus Berita" sidebar with topics like Potret Kemiskinan Bangsa and Pemerintah Kabupaten/Kota. The bottom screenshot is from **JEMBER TODAY**, showing an article titled "Pembangunan Tambak Udang Vaname SMK Puger Dihentikan Pol PP Gumukmas" dated 20 Sep 2022 15:07 WIB. It features a similar layout with a search bar, navigation menu, and a main image of a construction site.



Pembaruan Peristiwa

Hanya selang beberapa hari, pemberitaan tentang pemberhentian/penyegelan pembangunan tambak udang vaname SMK Perikanan dan Kelautan Puger karena belum mengantongi izin resmi dan berada di kawasan sempadan pantai terus menyebar. Pemberitaan menyebar tidak hanya di kalangan portal berita lokal Jember saja.

Meskipun tidak sampai naik atau ramai di media-media arus utama seperti Jawa Pos, Kompas.com, dan sebagainya, berita tersebut juga mulai diliput oleh banyak portal-portal berita lainnya, seperti *BeritaJatim.com*, *Radarjember* yang merupakan jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos Group sendiri merupakan jaringan media yang cukup besar di Jawa Timur yang mampu mempengaruhi opini publik.



Pada 22 September 2022, *Radarjember* menurunkan artikel berjudul “Dinyatakan Belum Kantongi Izin, Pemkab Jember Tertibkan Tambak Milik SMK”.

Pada berita tersebut, *Radarjember* tidak lagi mengutip *statement* dari Camat Gumukmas, Nino Eka Wahyu Ramadhoni, Portal berita ini malah sudah selangkah lebih maju dengan mengutip Asisten II Pemkab Jember, Hendro Soelistijono, yang semakin memperkuat penyegelan. Hendro menegaskan bahwa Pemkab Jember menghentikan aktivitas pendirian usaha tambak milik SMK itu karena sekolah belum mengantongi izin resmi.

“Pembangunan tambak milik SMK itu belum ada izinnya. Dan intinya, Pemkab telah memerintahkan untuk menghentikan pembangunannya,” kata Hendro.



Pada 24 September 2022, *Radarjember* kembali menurunkan artikel dengan judul “Minta Pemkab Jember Bersikap Tegas”. Pada berita ini, *Radarjember* menampilkan wawancara dari dengan Anggota Komisi B DPRD Jember (Ghufron), Sekretaris Komisi B DPRD Jember (David Handoko Seto), dan Asisten II Pemkab Jember (Hendro Soelistijono) saat melakukan tinjauan langsung dan memantau aktivitas pemasangan patok pelarangan aktivitas maupun pendirian usaha, termasuk tambak di Jember.



Berita kali ini, *Radarjember* sudah mulai membangun opini masyarakat dengan penegasan *statement* dari David Handoko Seto selaku Sekretaris Komisi B DPRD Jember yang mengatakan bahwa Komisi B mendukung menghentikan aktivitas pendirian usaha tambak milik SMK Perikanan dan Kelautan Puger.

“Hari ini, siapa pun yang tetap melakukan aktivitas pendirian tambak, kami minta pemkab menghentikan mereka. Karena mereka sudah tidak menghormati pemerintah daerah, dan lagi tidak memiliki izin,” pintanya .. (David Handoko Seto).

Dampak Berita dan Level Krisis

Sebagai sekolah dengan reputasi yang cukup baik selama ini, pemberitaan tentang penyegelan tambak udang vaname yang sedang dibangun oleh SMK Perikanan dan Kelautan Puger ini tentunya dapat berdampak pada citra dan persepsi publik. Pemberitaan tentang SMK Perikanan dan Kelautan Puger yang tidak memiliki izin saat mendirikan tambak dapat menggiring bahwa SMK ini tidak patuh pada asas aturan yang berlaku, sembrono, dan semaunya sendiri serta berpotensi melawan hukum.

Dengan ramainya pemberitaan tersebut jelas tidak hanya dapat menghancurkan reputasi SMK di mata masyarakat, tetapi juga di mata mitra industri yang selama ini mendukung dan bekerja sama dengan sekolah dalam banyak aspek. Citra “negatif” tersebut pada akhirnya juga akan berdampak pada

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Penyegehan tambak udang milik SMK Perikanan dan Kelautan Puger ini tidak bisa dilepaskan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi karena sejumlah alasan.

Pertama, SMK berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kedua, tambak udang yang sedang dibangun merupakan bagian dari program Tefa yang menjadi salah satu program pemerintah dalam mentransformasikan pendidikan vokasi di Indonesia. Ketiga, tambak udang yang dibangun tersebut melalui program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan yang menjadi salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Dengan berbagai alasan tersebut maka pemberitaan terkait dengan penyegehan ini memberikan sentimen yang cukup negatif bagi SMK Perikanan dan Kelautan Puger dan juga Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Terlepas dari hal tersebut, berbagai pemberitaan yang cukup masif terhadap peristiwa penyegehan tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah krisis yang secara khusus dihadapi oleh SMK Perikanan dan Kelautan Puger.

Jika merujuk pada buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), level krisis yang dihadapi dalam kasus pemberitaan ini tergolong pada level krisis yang cukup berat. Pasalnya, dampak krisis telah mengganggu operasional SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Sekolah ini terpaksa harus menghentikan



sementara pembangunan Tefa tambak udang vaname menyusul gencarnya pemberitaan tersebut.

Leadership is Key

Beberapa hari setelah muncul pemberitaan terkait dengan penghentian proses pembangunan tambak udang yang akan digunakan sebagai Tefa bersama dengan industri, Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger segera merilis sebuah pernyataan resmi di laman website sekolah mereka. Isi pernyataan tersebut menyatakan bahwa Tefa Tambak Udang tersebut berstatus Legal.

Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kuntjoro Basuki, rupanya langsung mengambil sikap dan langkah-langkah taktis untuk merespon pemberitaan tersebut. Meskipun di awal pemberitaan sempat disebutkan bahwa kepala sekolah belum merespons wawancara dengan media, Kuntjoro justru mengambil langkah mengumpulkan bukti-bukti tentang kelegalan dari tambak udang yang didirikan. Misalnya adalah dengan menemui instansi terkait. Berbekal semua data fakta yang dikumpulkan tersebut, SMK Kelautan dan Perikanan Puger pun menurunkan pernyataan yang dimuat melalui laman mereka sebagai berikut.

TEACHING FACTORY TAMBAK UDANG VANAME SMK PERIKANAN DAN
KELAUTAN PUGER JEMBER DI KEPANJEN GUMUKMAS BERSTATUS LEGAL

Jember (6/10) Tulisan ini sebagai penjelasan atas isu yang beredar di media sosial dan pemberitaan koran lokal bahwa lahan tambak milik SMK Perikanan dan Kelautan Puger statusnya ilegal. Hal tersebut disanggah oleh Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Drs. H. Kuntjoro Basuki, M.Si. Dalam audiensinya di Aula Bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada 20 September lalu beliau

bersama tim menjelaskan, bahwa status lahan tersebut adalah lahan wakaf legal di bawah Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darsul Bihar Jember. Turut diundang dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Kesbang dan Politik kabupaten Jember, Kepala Dinas PUPRKP Cipta Karya Kabupaten Jember, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember.

Saat ini, antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023, SMK Perikanan dan Kelautan Puger di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darsul Bihar Jember sedang dalam proses melaksanakan *Teaching Factory* "Agribisnis Perikanan Payau Laut" dengan konsentrasi produksi pada intensifikasi budidaya udang vaname kualitas ekspor. Kegiatannya antara lain adalah pembangunan dan penyiapan tambak, penebaran benih sampai dengan pembersaran dan pemanenan udang. *Teaching Factory* ini dikerjakan bersama dengan mitra industri SMK Perikanan dan Kelautan Puger yaitu PT Istana Cipta Sembada dan CV Baik Benur Hatchery Lumajang dan pendampingan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik serta Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Teaching Factory Tambak Udang Vaname SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember di Kepanjen Gumukmas Berstatus Legal

Lokasi *Teaching Factory* tambak budidaya udang vaname tersebut ada di Dusun Jeni Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Tambak dibangun di atas lahan bersertifikat wakaf Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darsul Bihar Jember.
- 2) Posisi lahan atau tambak berada di sebelah utara Jalur Lintas Selatan. Ini berarti lahan atau tambak tidak berada pada sempadan pantai.
- 3) Di samping dibangun dari wakaf yayasan, tambak dibangun juga dari lahan atas sewa dari beberapa masyarakat sekitar tambak.
- 4) Proses pembangunan tambak dan proses produksi *Teaching Factory* dikerjakan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar Dusun Jeni Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas.
- 5) Pembangunan dan penyiapan tambak dirancang, diproses, dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren Darsul Bihar, SMK Perikanan dan Kelautan Puger bersama tim perencana, tim pelaksana. dan tim ahli dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia.
- 6) *Teaching Factory* sekaligus sebagai Pusat Penelitian Akuakultur Berkelanjutan bekerja sama dengan Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang.
- 7) Pembangunan dan penyiapan tambak didukung oleh berbagai instansi perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan dalam ini Pimpinan Wilayah Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
- 8) Pembangunan tambak dan *Teaching Factory* dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir serta pemberdayaan sumber daya alam pesisir. Yang paling utama adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia kemaritiman kelautan dan perikanan. Selain itu keberadaan tefa ini sebagai sarana praktik pendidikan vokasi dan pemberdayaan santri taruna SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren

Darsul Bihar Jember.



Dengan demikian pembangunan Tefa di SMK Perikanan dan Kelautan Puger, termasuk “Agribisnis Perikanan Payau Laut Intensifikasi Budi Daya Udang Vaname Kualitas Ekspor” pada tambak di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember **secara akademis dan operasional sudah prosedural sesuai regulasi dan legal**. Jika ada pihak yang memperlmasalahkan tambak dan pelaksanaan Tefa berarti bertentangan dengan kehendak Inpres dan Perpres dan harus diluruskan. (spmi)

Seperti tergambar dalam paragraf terdahulu terlihat bahwa penanganan dan penyelesaian kejadian krisis tidak terlepas dari sikap pimpinan, baik pimpinan organisasi maupun tim humas dan publikasinya. Dalam kasus berita tersebut di atas adalah karakter pemimpin organisasi yang memimpin pada saat peristiwa, yakni Kepala SMK Kelautan dan Perikanan Puger.

Keberhasilan proses penanganan sebuah krisis biasanya tidak hanya terkait dengan dengan sifat pemimpinnya, tetapi juga kerap dikaitkan juga dengan gaya kepemimpinannya. Atau dengan kata lain, penanganan sebuah krisis juga erat kaitannya antara *leader* dan *leadership*, pemimpin dan kepemimpinannya.

Jika melihat pada dasar katanya, kata *a leader*, sebagai orang yang memimpin, yang berasal dari kata *to lead* yang berarti *to show the way, especially by going first; to direct or guide; taking the leading role* (menunjukkan jalan, terutama dengan

cara berjalan terlebih dahulu; mengarahkan atau memandu; mengemban peran memimpin).

Leadership sebagai kata benda memberikan arti: *the act of leading; the ability to be a leader* (tindakan memimpin, kemampuan menjadi pemimpin). Seorang pemimpin dijabarkan sebagai *a leader is the person who goes first; the inspirator, instigator or head of a movement* (pemimpin adalah orang yang bertindak terlebih dahulu; pemberi inspirasi; pemicu atau ketua pergerakan).

Pemimpin yang sungguh-sungguh mengerti arti kata *leader* dan menjalankan makna kata itu disebut sebagai seorang pemimpin yang memiliki *leadership skills* (keterampilan memimpin) atau bisa juga disebut sebagai kompetensi kepemimpinan atau *leadership competencies*.

Leadership competencies merujuk bahwa selain seorang pemimpin harus dapat menunjukkan arah, harus pula menunjukkan visi masa depan, menjadi *role model* karena pada dasarnya bawahan dan orang-orang lebih dapat dipengaruhi melalui contoh. Hal lain yang tidak kalah penting dalam *leadership competencies*, yaitu bahwa pemimpin seharusnya adalah komunikator yang efektif. Keterampilan ini sesungguhnya menjadikan perubahan fundamental bagi sikap kepemimpinan.

Sebagai komunikator yang efektif, seorang pemimpin tidak



hanya untuk mengomunikasikan visi, tetapi sekaligus menjadi inspirasi sedemikian rupa sehingga emosi tergerak. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam masa krisis dan masa ketidakpastian.

Dalam banyak kasus, gaya kepemimpinan juga akan memengaruhi kecepatan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam krisis. Biasanya gaya kepemimpinan militer akan dengan cepat mengambil keputusan jika menghadapi krisis, meskipun terkadang kecepatan ini juga tidak selalu berdampak bagus pada keputusan yang diambil.

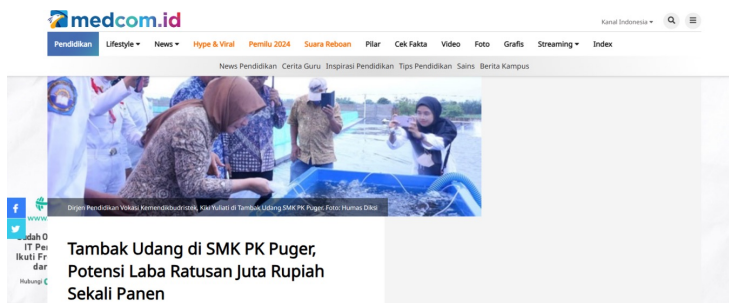
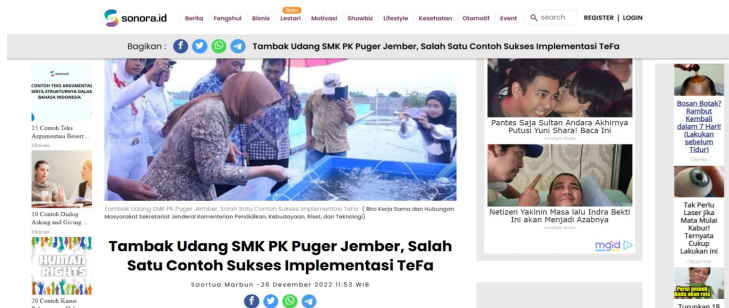
Dalam kasus SMK Perikanan dan Kelautan Puger, meskipun Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger bukanlah berasal dari kalangan militer, jika dilihat sekolah ini juga melakukan pembelajaran yang semiliter untuk melatih kedisiplinan siswa yang mereka sebut sebagai taruna dan taruni SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Oleh karena itulah, tidak mengherankan jika gaya kepemimpinan Kuntjoro Basuki cenderung cepat dalam merespons isu yang berkembang sehingga tidak menjadi sebuah krisis yang lantas berkepanjangan.

Kuntjoro Basuki juga taktis dalam menyusun hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Ia mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan keabsahan atas lahan yang sempat dipermasalahkan dan diungkapkan oleh media. Ia berdialog dengan instansi terkait

untuk memastikan bahwa apa yang diberitakan media tidak benar. Setelah itu, mereka memutuskan untuk membuat rilis yang dimuat di *website* atau laman resmi mereka.

Gaya kepemimpinan Kuntjoro dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan dan menyajikan bukti-bukti fakta menjadi SMK Perikanan dan Kelautan Puger tetap bisa melindungi citra positif instansi mereka.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari berbagai liputan positif media terkait dengan keberhasilan Tefa Tambak Udang Vaname mereka. Sorotan positif dari media dan masyarakat ini seolah menutup bahwa apa yang lahan tambak tersebut pernah bermasalah.





Kesimpulan

Merujuk pada Buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), salah satu elemen penting dalam manajemen krisis yang berhasil adalah adanya kepemimpinan yang kuat dan efektif. Ini bukan hanya tugas orang paling atas dalam bisnis yang perlu menunjukkan keterampilan kepemimpinan. Hal tersebut harus ditunjukkan pada setiap tingkat struktur dalam menangani krisis. Setiap orang yang memiliki tanggung jawab terhadap elemen respons harus menganut kualitas yang diperlukan untuk membantu organisasi melewati krisis, memulihkan diri, dan melanjutkan menuju masa depan yang aman.

Ada 10 (sepuluh) kualitas kepemimpinan kunci yang perlu ditunjukkan untuk mendukung komunikasi krisis yang efektif. Seorang pemimpin yang dapat menunjukkan semuanya akan menempatkan organisasi dalam posisi yang lebih menguntungkan, dan ini seharusnya menjadi sesuatu yang dicari oleh semua orang yang memimpin organisasi. Sepuluh kualitas tersebut adalah

1. memotivasi,
2. konsisten,
3. tegas,
4. penuh kasih,
5. terlihat,
6. etis,
7. tangguh,
8. bertanggung jawab,

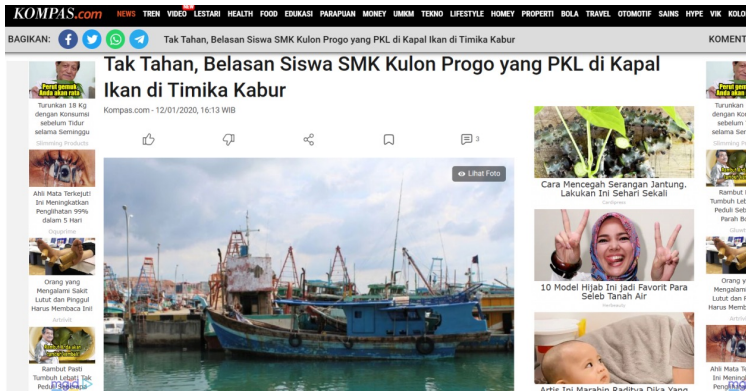
9. efektif dalam berkomunikasi, dan
10. terampil dalam mengelola harapan.

Gaya kepemimpinan dan kualitas pemimpin akan sangat memengaruhi tentang bagaimana sebuah organisasi menangani isu-isu krisis, risiko krisis, maupun krisis itu sendiri. Salah satu kualitas seorang pemimpin adalah efektif dalam berkomunikasi. Seorang pemimpin yang mampu menjalankan komunikasi secara efektif diyakini akan mampu dan lebih mudah dalam menangani isu-isu krisis, risiko krisis, maupun krisis itu sendiri. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger.



Kasus Tiga

Krisis Mengintai dari Kegiatan Magang



KOMPAS.com -Belasan pelajar dari SMK Negeri 1 Temon Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sempat melarikan diri saat menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) bersama dua kapal motor (KM) penangkap ikan. Mereka turun dari salah satu kapal motor yang sedang bersandar di Timika, Papua.

Para pelajar ini turun dari kapal lantas meminta perlindungan pada komunitas Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) di Timika.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temon Fauzi Rokhman membenarkan kabar ini. Namun, ia mengaku belum tahu pasti apa penyebab para siswa undur di tengah mereka melakoni kegiatan magang ini.

“Belum tahu pasti kenapa. Kami masih mencari tahu. Karena itu, kami dan para guru berangkat ke sana (Timika),” kata Fauzi melalui sambungan selular, Sabtu (11/1/2020).

Fauzi mengungkapkan, dirinya mesti memperoleh keterangan lengkap dari pihak para pelajar. Ia pun belum bersedia mengungkap apa penyebab kejadian ini.

Sejauh ini, SMK Negeri 1 Temon sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Fauzi bersama 2 guru lain berangkat ke Timika hari ini, untuk menggali keterangan dari para siswa sekaligus menjemput.

Mereka juga akan bertemu dengan pemilik komunitas kerukunan Jawa serta pemilik dan nakhoda kapal yang diikuti para pelajar. Sebanyak 16 siswa SMK 1 Temon melakoni magang berlayar pada 2 kapal penangkap ikan KM RJ dan FA.

Satu kapal diikuti 10 siswa, sisanya di kapal lain. Mereka pelajar kelas 11 Jurusan Nautika dan Teknik.

“Mereka bekerja di kapal penangkap ikan di mana pekerjaannya adalah seluk beluk di kapal penangkapan ikan itu, bisa mesin, bisa alat tangkap dan mengoperasikan alat tangkap,” kata Fauzi.

Mereka sebenarnya tengah menjalani praktek lapangan selama 6 bulan, dengan sekitar 3-4 bulan di antaranya ada kegiatan berlayar. Belum genap 1 bulan, peristiwa siswa memilih berhenti pun terjadi.

Sebagian besar siswa kabur dan menginginkan pulang ke Kulon Progo. Pihak sekolah pun belum bisa menentukan sikap sebelum bertemu semua pihak lantaran magang di kapal ini bersifat wajib dan menjadi salah satu syarat lulus sertifikasi.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Temon Kumpul Setyo Hery Purnomo mengungkapkan, pihaknya turut mengikuti perkembangan peristiwa ini. Hery mengungkapkan hanya 4 siswa saja yang akhirnya tidak meneruskan perjalanan bersama kapal ikan. Selebihnya sedia kembali berlayar. Pihak sekolah pun kini tengah menjemput mereka di Timika.

“Kami sebatas memantau dan sudah berkoordinasi agar pihak sekolah menghubungi wali murid. Dari sana diketahui 4 anak yang kembali ke pihak sekolah. Tidak semua yang ingin pulang atau dipulangkan. Yang lainnya praktek berlayar,” kata Hery juga lewat sambungan telepon.

Ia menjelaskan, kasus ini sudah berlangsung sejak Senin. Awalnya, pihak sekolah menerima kabar semua pelajar sekolahnya melarikan diri saat RJ dan FA sandar di Timika. Mereka beralasan turun lantaran kehidupan dan pekerjaan di kapal itu sangat berat. Mereka turun dan berlindung di KKJB.

KKJB dan sekolah saling komunikasi mulai Selasa malam. Sejak itu, sekolah merapatkan kasus ini dengan pihak keluarga siswa. Empat siswa ditarik pulang. Sabtu ini, kepala sekolah dan beberapa guru berangkat ke Timika menjemput mereka.

“Hanya 4 siswa dikembalikan. Lainnya melanjutkan,” kata Hery.

Kepala Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Handri Tatik Widayati mengungkapkan, pihaknya turut memantau terus perkembangan kasus ini dan pihak sekolah sudah langsung berangkat ke Timika. Ia berharap ke depan pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap praktek industri seperti ini. “Mungkin perlu evaluasi di mana tempat PKL itu yang dekat-dekat saja,” kata Hendri juga via telepon.



Kulon Progo - Sebanyak 15 siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Temon Kulon Progo melarikan diri saat sedang mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kapal Motor (KM) RJ 01. Mereka kabur saat kapal tempat mereka berpraktek bersandar di Timika Papua.

Informasi yang dihimpun, ada 16 siswa SMK Negeri 1 Temon mengikuti PKL di atas kapal sejak akhir Desember 2019. Selama di atas kapal, para siswa ini ikut dalam penangkapan ikan. Selain itu mereka mendapat istirahat seadanya dan perlakuan kurang menyenangkan.

Akhirnya mereka kabur karena diduga mengalami kekerasan fisik saat menjalani PKL tersebut. Mereka kabur saat kapal bersandar di Timika. Dari 16 siswa, hanya satu siswa yang memilih bertahan di kapal tempat praktek. Saat ini 15 siswa yang kabur tersebut berada di Sekretariat Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) di Timika.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temon Fauzi Rokhman mengaku sudah menerima kabar resmi tentang anak didiknya yang kabur saat PKL. Namun pihak sekolah, belum mengetahui secara pasti apa penyebab para siswa ini kabur. “Informasi sementara yang kami terima, siswa mengeluh mengalami kekerasan dari anak buah kapal (ABK),” ujar Fauzi di Kulon Progo, Jumat 10 Januari 2020.

Fauzi mengatakan pihak sekolah, baru mendapat keterangan dari pihak siswa, sehingga belum mengetahui penyebab pasti permasalahan yang terjadi. Ada kemungkinan, permasalahan kaburnya siswa hanya kesalahpahaman karena siswa belum terbiasa berada di dalam kapal dalam waktu lama.

Informasi sementara yang kami terima, siswa mengeluh mengalami kekerasan dari anak buah kapal (ABK).

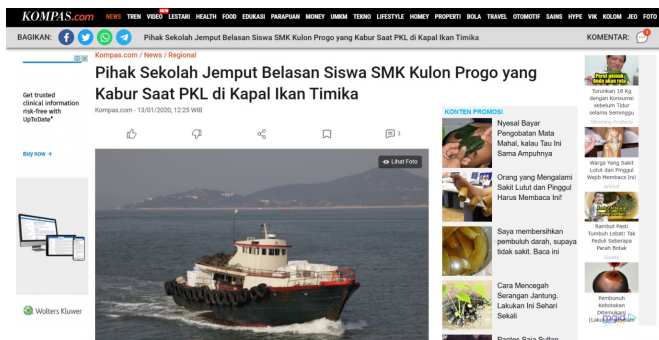
Dia mengatakan SMK Negeri 1 Temon sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Rencananya Sabtu 11 Januari 2020, perwakilan sekolah akan berangkat ke Timika untuk menemui para siswa yang kabur, Pengurus KKJB serta pemilik dan nahkoda

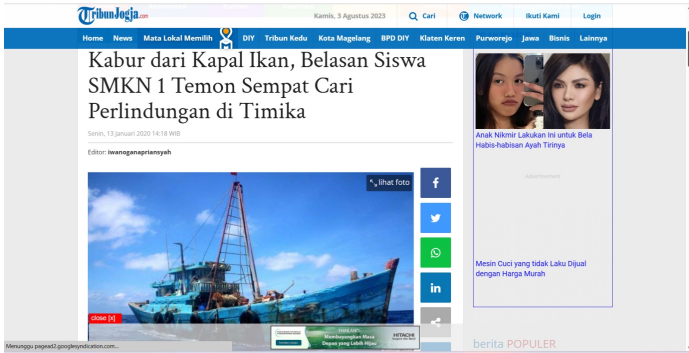
serta ABK KM RJ 01. “Rencana Sabtu ini kami berangkat ke Timika. Menurut dia, yang melegakan kabar dari salah satu alumni sekolah yang menjadi anggota TNI AL di Timika, semua anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan aman. “Kabarnya semua siswa dalam kondisi sehat dan aman,” ungkapnya.

Fauzi menjelaskan, ke-15 siswa yang kabur dari kapal menginginkan pulang ke Kulon Progo. Namun demikian, pihak sekolah belum bisa menentukan sikap sebelum berangkat ke Timika. Mengingat PKL bagi siswa SMK N 1 Temon bersifat wajib dan menjadi salah satu syarat lulus sertifikasi.

Anggota DPRD DIY Lilik Syaiful Ahmad mengaku siap membantu dan menjembatani permasalahan yang terjadi. “Siswa ini perlu mendapat suport dan penyemangat,” kata Lilik.

Lilik menjelaskan, permasalahan tersebut harus ditelusuri sampai tuntas. Hal ini karena ada empat siswa yang diblacklist oleh nahkoda dan ABK kapal, tidak boleh ikut berlayar lagi.





Latar Belakang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya membangun dan menguatkan pendidikan vokasi di Indonesia melalui berbagai kebijakan. Kerja sama antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam hal penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten, kolaborasi riset,

dan pengembangan bersama kurikulum adalah salah satu indikator keberhasilan pendidikan vokasi. Berbagai program telah digulirkan untuk meningkatkan keselarasan dan relevansi pendidikan vokasi, salah satunya melalui magang.

Magang adalah salah satu bentuk pembelajaran seperti tertuang di pasal 14 ayat 4 dan 5 huruf f pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Magang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam memasuki DUDI melalui keterlibatan DUDI itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan magang, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (PTPPV) memiliki kekhasan dan karakteristik sesuai dengan keunggulan spesifik program studi pendidikan tinggi vokasi tersebut. Pelaksanaan magang juga bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan DUDI sebagai mitra strategis.

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, telah mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang memberikan hak belajar selama maksimum 3 (tiga) semester di luar program studi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya kerja, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, kompetensi mahasiswa harus disiapkan dengan baik, terlebih untuk pendidikan tinggi vokasi (PTV) sebagai ujung tombak yang memberikan kontribusi terhadap penyiapan SDM unggul.



Magang adalah kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam kurikulum pembelajaran, serta dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai DUDI. Magang juga sekaligus memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik lapangan serta mendekatkan mahasiswa kepada *user* atau pengguna, yakni DUDI. Magang merupakan usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam rangka mencapai sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian tertentu.

Selain itu, magang menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mempelajari hal baru yang belum/jarang didapatkan di kampus, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja dalam tim, penyelesaian masalah, berpikir kritis, mengasah kreativitas, dan lain sebagainya. Dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa memiliki hak untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester dengan rincian, satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pelaksanaan magang pada PTPPV memungkinkan mahasiswa untuk menggunakan kesempatan 2 semester aktivitas pembelajaran di luar kampus. Sebagai bentuk keunggulan dan ciri pendidikan tinggi vokasi kesempatan

tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan belajar magang.

Durasi pelaksanaan magang yang telah ditetapkan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu durasi magang yang pendek (kurang dari 6 bulan) belum cukup memberikan wawasan, pengalaman, dan kompetensi untuk mahasiswa. Pihak industri penerima mahasiswa magang menyatakan bahwa pelaksanaan magang dengan waktu pendek kurang bermanfaat dan belum dapat memberikan kontribusi positif, bahkan berpotensi mengganggu aktivitas/kegiatan di DUDI.

Magang tidak hanya untuk mahasiswa vokasi, para siswa SMK juga melaksanakan magang untuk meningkatkan kompetensi siswa di luar lingkungan belajar sekolah. Proses yang dijalani oleh siswa selama magang menjadi bagian dari proses pembelajaran oleh siswa untuk menerapkan ilmu yang didapat di sekolah dengan dunia industri nyata. Magang menjadi suatu tahap pembelajaran praktik yang ada di antara masa pendidikan dan masa kerja.

Magang juga dikenal dengan praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kerja industri (Prakerin), yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, serta menyinkronkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Pentingnya program magang bagi siswa tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa, khususnya SMK.



Keseriusan dan semangat siswa dalam melaksanakan magang akan memberikan dampak positif, di antaranya dapat membuka wawasan, memperluas jaringan, mengembangkan keterampilan, memberi nilai lebih, serta memberi peluang pekerjaan saat lulus.

Dalam perspektif komunikasi krisis, magang kerja dapat menjadi sumber dari krisis dalam sebuah organisasi. Kita kerap melihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang berseliweran di media massa terkait dengan persoalan magang. Salah satunya adalah pemberitaan terkait magang yang menjadi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Terjunnya siswa maupun mahasiswa ke dalam lingkungan kerja dapat memicu berbagai potensi masalah yang terjadi pada diri siswa maupun mahasiswa, di antaranya adalah kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Beberapa kasus magang mendapat sorotan yang cukup kuat dari media. Kasus magang terbaru yang cukup menyita publik misalnya adalah kasus magang di Jepang yang dilakukan oleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatra Barat.



Bareskrim Ungkap Kasus Perdagangan Orang Modus Magang ke Jepang Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus program magang ke Jepang. Kasus tersebut melibatkan salah satu politeknik di Sumatera Barat.

"Selama satu tahun, korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, akan tetapi bekerja seperti buruh," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Djuhandhani mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan korban berinisial ZA dan FY kepada pihak KBRI Jepang. Dalam laporannya, Djuhandhani menerangkan korban bersama dengan 9 mahasiswa lainnya dikirim oleh politeknik dengan dalih program magang di perusahaan Jepang.

Djuhandhani menjelaskan kasus TPPO tersebut bermula ketika para korban mendaftarkan diri untuk mengikuti program magang pada 2019. Para korban yang telah mendapatkan 'persetujuan' dari EH selaku Direktur di Politeknik tersebut kemudian diberangkatkan dengan menggunakan visa pelajar yang berlaku selama 1 tahun dan diperpanjang dengan visa kerja selama 6 bulan.

Bukanya diarahkan untuk belajar sambil bekerja, Djuhandhani mengatakan para korban malah dipaksa bekerja selama selama 14 jam atau sejak pukul 8 pagi



hingga pukul 10 malam. Para korban juga diharuskan bekerja selama 7 hari dalam seminggu tanpa ada libur.

“Di mana dalam aturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 19 yang isinya untuk pembelajaran 1 SKS seharusnya 170 menit per minggu dalam satu semester,” jelas dia.

Lebih lanjut, Djuhandhani menuturkan korban juga diharuskan menyetorkan dana kontribusi kepada pihak kampus sebesar 17.500 yen atau setara Rp2 juta. Uang setoran tersebut diambil oleh EH dari total pendapatan mahasiswa yang mencapai 50 ribu yen atau setara Rp5 juta per bulannya.

Djuhandhani mengatakan sejumlah korban sempat meminta untuk dipulangkan ke Indonesia setelah kontraknya selesai. Namun, lanjutnya, korban justru diancam akan di *drop out* apabila kerja sama dengan pihak perusahaan Jepang rusak.

Peristiwa

Pemberitaan tentang kaburnya 15 siswa SMK 1 Temon, Kecamatan Temon, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta yang sedang mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di Kapal Motor (KM) RJ 01 dan KM VA 2 yang tengah bersandar di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako, Timika, Papua tersebut bermula dari portal berita lokal. Dalam berita tersebut dikabarkan bahwa sejumlah siswa SMK kabur meninggalkan kapal. Mereka diduga melarikan diri karena tak tahan dengan perlakuan anak buah kapal (ABK).

Dari informasi yang diperoleh Harian Jogja, total siswa yang ikut PKL sebanyak 15 orang. Siswa dari Jurusan Nautika Kapal dan Teknik Kapal itu mengikuti PKL dengan berangkat dari Pelabuhan Juwana Pati menuju Timika pada 27 Desember 2019.

Peristiwa kaburnya siswa PKL diberitakan mulai dari koran lokal hingga ke media *mainstream* atau arus utama seperti Kompas, Republika, dan sebagainya. Beberapa media arus

utama kemudian mulai menuliskan pemberitaan kaburnya para siswa. Ada rumor para siswa ini kabur setelah mendapat penyiksaan oleh ABK pada kapal yang mereka tumpangi.

Selain berita tentang kaburnya siswa PKL, ada juga pemberitaan mengenai kasus magang mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Awal pemberitaan terkait tindak kekerasan pada mahasiswa magang ini justru dimulai dari media *mainstream* melalui agenda konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers dan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang ke Jepang. Kasus tersebut melibatkan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pengungkapan kasus itu sendiri berawal dari laporan korban berinisial ZA dan FY kepada pihak KBRI Jepang yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Setelahnya, Polri melalui Bareskrim kemudian mengungkap kasus tersebut dalam sebuah konferensi pers.

Pembaruan Peristiwa

Meskipun terjadi dalam waktu yang berbeda, pola dalam *update* kedua peristiwa ini sama. Akar permasalahan yang muncul dari isu ini sama, yakni program magang (siswa dan mahasiswa). Program yang menjadi ciri khas dari pendidikan vokasi justru menjadi salah satu akar krisis yang terjadi dan



menimpa kedua institusi pendidikan vokasi tersebut.

Selama kurang lebih sepekan, berita tentang kaburnya siswa SMKN 1 Temon dari kapal tempat mereka magang terus di-*update* oleh media. Media yang membicarakan isu ini juga tidak hanya sebatas media lokal melainkan juga media arus utama.

Buntut dari kasus ini bahkan sampai menjadi sebuah diskusi penting di Komisi Nasional Perlindungan Anak. Begitu juga dengan pemberitaan tentang program magang yang berujung pada kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang menyerpa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Isu magang mahasiswa yang bergulir dan dikaitkan dengan isu TPPO ini terus di-*running* oleh berbagai media, baik media nasional maupun media lokal.

Isu ini pun menjadi pembicaraan media lantaran baik isu magang maupun TPPO menjadi salah satu isu yang cukup “seksi” bagi media. Di sisi isu ini juga relevan dengan keseharian masyarakat utamanya bagi para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke jalur pendidikan vokasi yang mengharuskan adanya program magang.



Dampak Berita dan Level Krisis

Dalam buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil dari sebuah krisis: (a) organisasi tersebut diberhentikan usahanya, hancur, mungkin diadili, dan eksekutif kunci mungkin dihadapkan pada tuduhan kejahatan; (b) organisasi tersebut tetap beroperasi, tetapi citra dan penghargaan di mata publiknya tergerus, dan mungkin juga mengalami kerugian finansial yang signifikan; dan (c) organisasi tersebut setelah pertempuran berat berhasil memenangkan pertarungan opini publik dan dilihat dengan penuh dukungan seperti sebelumnya atau bahkan lebih baik.



Jika melihat pada tiga dampak di atas, krisis yang ditimbulkan dari pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak SMK yang tengah magang yang berujung pada kaburnya para siswa saat magang serta berita tentang TPPO pada mahasiswa magang tersebut berdampak pada poin a dan juga poin b. Buntut dari pemberitaan terkait TPPO membuat citra organisasi di mata publik tergerus meskipun kedua organisasi tersebut (SMK 1 Temon dan Politani Payakumbuh) tetap dapat beroperasi secara normal. Buntut dari pemberitaan tersebut juga berdampak pada dicopotnya sejumlah petinggi (Direktur lama Politani Payakumbuh).

Sementara itu, jika dilihat dari level krisisnya, pemberitaan terkait kasus kekerasan dan kaburnya siswa magang dapat dikategorikan pada level krisis yang cukup berat. Pada kasus ini, tidak hanya organisasi yang menjadi terganggu dengan pemberitaan tersebut, tetapi juga masyarakat yang juga terdampak pada kasus pemberitaan ini. Utamanya adalah masyarakat yang menjadi keluarga korban kekerasan magang maupun keluarga mahasiswa.

Kasus ini juga telah masuk pada krisis yang ditandai dengan ramainya perbincangan tentang kasus-kasus tersebut di ruang-ruang publik dan pihak eksternal lain yang sudah terlibat di dalamnya, yakni polisi yang membantu untuk penanganan kasus tersebut.

Selain riuhnya pembicaraan di ruang publik terkait kedua kasus tersebut, kasus tersebut juga telah berdampak pada rusaknya reputasi dengan penetapan sejumlah petinggi Politani Payakumbuh sebagai tersangka. Magnitudo dari pemberitaan tersebut juga semakin kuat karena begitu banyaknya media yang memberitakan pemberitaan terkait TPPO.

Delay is Deadly

Dari kasus ini, kita belajar bahwa respons dengan sesegera mungkin menjadi salah satu strategi saat menghadapi peristiwa yang berpotensi menjadi pintu masuk untuk terjadinya krisis. Hal ini dapat dilihat dari respons Kepala SMK Negeri 1 Temon, Fauzi Rokhman, yang langsung merespons pemberitaan dengan memberikan keterangan saat dimintai tanggapan oleh media. Fauzi tidak berkelit atau bahkan menghindari dari kejaran media yang ingin melakukan konfirmasi atas berita tersebut.

“Informasi sementara yang kami terima, siswa mengeluh mengalami kekerasan dari anak buah kapal (ABK). Kami baru mendapat keterangan dari pihak siswa, sehingga belum mengetahui penyebab pasti permasalahan yang terjadi. Ada kemungkinan, permasalahan kaburnya siswa hanya kesalahpahaman karena siswa belum terbiasa berada di dalam kapal dalam waktu lama.” ujar Fauzi di Kulon Progo (Kompas/ Jumat 10 Januari 2020)

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, John Nefri, langsung merespons cepat pemberitaan terkait kasus TPPO yang menjerat mantan Direktur pada politeknik tersebut.



“Secara institusi PPNP prihatin atas kejadian ini, yang sudah menimbulkan keresahan, kerugian serta pertanyaan dari berbagai pihak PPNP secara instansi mendukung dan menghormati segala proses hukum yang sedang berlangsung. Kami sangat menghargai dan menghormati semua proses hukum,” ucapnya. (Kasus TPPO Kampus Sumbar, Direktur Politeknik Payakumbuh: Magang ke

Jepang Sudah Dihentikan/ Tempo 4 Juli 2023)

John Nefri juga memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui wawancara media bahwa program magang ke Jepang sudah dihentikan pihak kampus sejak 2020.

Respons cepat dari kepala sekolah dan pimpinan politeknik tersebut membuat kedua organisasi ini bisa mengendalikan situasi lebih dini. Pasalnya, jika kedua organisasi tersebut lambat dalam merespons, situasi bisa semakin tidak terkendali, misalnya, timbul rumor yang akan menyudutkan pihak sekolah maupun kampus. Dampaknya adalah reputasi baik pada program maupun pada institusi akan jatuh. Mereka juga bisa gagal menghentikan persepsi negatif institusi.

Dengan kata lain, kecukupan informasi adalah “*center of variable*” dalam mempersepsi risiko dan proses komunikasi. Semua harus bermula dari respons yang cepat dari organisasi terhadap peristiwa yang muncul. Kecukupan informasi akan menjadi penyeimbang informasi lain yang telah beredar.

Respons cepat dapat dilakukan jika organisasi tidak panik saat menghadapi krisis. Sering kali peristiwa yang tidak diharapkan datang tiba-tiba, organisasi tidak siap, dan tidak tahu harus berbuat apa, selain panik.

Saat wartawan berdatangan mencari informasi, organisasi sebaiknya tetap bersikap tenang dan tidak panik serta merespons situasi dengan cepat. Salah satu caranya adalah memberikan informasi sesuai kadar yang dibutuhkan, tetapi tetap memperhatikan kecukupan informasi dan memperhatikan faktor publik, utamanya terkait dengan keselamatan publik.

Hal tersebut dilakukan oleh Kepala SMKN 1 Temon, Fauzi Rokhman. Fauzi tidak hanya merespons cepat, tetapi juga memberikan penjelasan bahwa kondisi siswa dalam keadaan baik dan pihak sekolah akan berangkat untuk menemui para siswa.

“Rencana Sabtu ini kami berangkat ke Timika. Kabarnya semua siswa dalam kondisi sehat dan aman dan yang melegakan bagi kami, salah satu alumni sekolah kami ada yang menjadi anggota TNI AL di Timika dan banyak membantu kami,”

ungkapnya (tagar.id /Jumat 10 Januari 2020).

Meletakkan prioritas utama pada keselamatan dan kepentingan publik merupakan salah satu respons cepat terbaik dalam menghadapi situasi krisis. Sementara itu, upaya mencari penyebab krisis dalam hal ini adalah kaburnya siswa dari kapal dilakukan setelah itu.

Di masa awal krisis, organisasi sebaiknya jangan terlalu fokus pada mencari “penyebab sesungguhnya”. Contohnya adalah setelah mendengar pesawatnya jatuh, yang mesti dilakukan maskapai adalah memastikan kondisi korban dan memberikan pertolongan. “Jatuhnya pesawat” sudah cukup untuk



memastikan penyebab krisis dan langsung merespons dengan cepat. Setelah itu baru dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pada kedua kasus magang di atas, respons cepat yang dilakukan adalah menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Misalnya adalah menyerahkan semua proses hukum kepada kepolisian serta pihak sekolah yang langsung berangkat ke Timika untuk bertemu dengan para siswa yang kabur dan memastikan mereka dalam kondisi yang baik-baik saja.

Hal tersebut penting mengingat efek kejut dari peristiwa tersebut tidak hanya dialami oleh orang tua korban, tetapi juga para orang tua siswa lain yang sedang melakukan PKL atau magang di industri, meskipun mungkin sedang PKL di tempat lain.

Dengan demikian, publik yang terkena imbas, baik langsung atau tidak langsung, dalam bentuk berupa fisik maupun psikologis dapat menjadi lebih tenang. Langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah bisa dikatakan sudah dapat memenuhi harapan publik yang perlu dipenuhi saat awal krisis terjadi.

Kesimpulan

Respons cepat diperlukan untuk menangani sebuah krisis agar dampaknya tidak melebar dan membesar. Tujuan dari respons cepat ini adalah agar organisasi dapat secepat mungkin mengendalikan situasi dan perlahan mengembalikan reputasi organisasi.

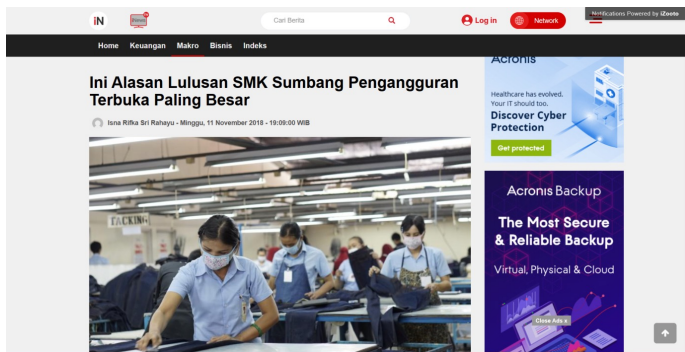
Kecepatan waktu sangat diperlukan untuk merespons peristiwa krisis. Bahkan, dalam buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis) semua komunikasi yang diarahkan untuk menangani krisis harus dimulai secepat mungkin dalam “*golden hour*”, yaitu satu jam pertama setelah pemberitahuan bahwa krisis telah terjadi. Artinya, segera mungkin setelah berita turun dan memenuhi ruang-ruang publik, pihak terkait harus sudah memberikan tanggapan untuk menjawab keingintahuan masyarakat, terutama keluarga korban atas kasus yang sebenarnya terjadi.

Respons cepat ini tidak masalah jika tanggapan yang diberikan masih bersifat sementara. Hal itu berarti pihak yang ditunjuk sebagai juru bicara harus dapat memastikan dan meyakinkan bahwa hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terjawab sudah. Akan tetapi, publik tetap harus diberitahu dan pemahaman bahwa apa yang disampaikan oleh seorang juru bicara akan terus di-*update* lebih lanjut. Langkah cepat ini adalah cara terbaik untuk menimbulkan kepercayaan publik pada organisasi bersangkutan.



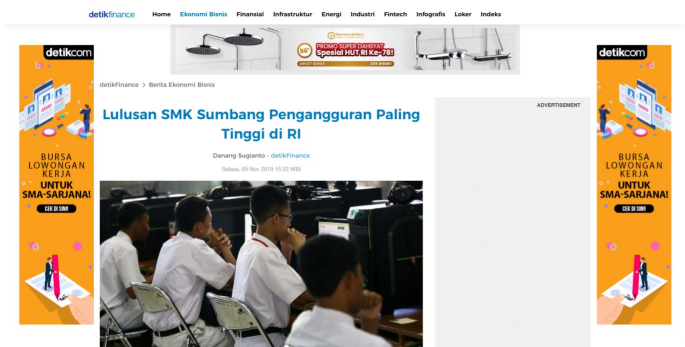
Kasus Empat

Isu Pengangguran yang Terus Berkembang



JAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terbuka Agustus 2018 sebanyak 7 juta orang. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbanyak yaitu sebesar 11,24 persen sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen. Ekonom *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah sebelumnya yang mendorong jumlah SMK lebih banyak dari SMA. Meski bertujuan untuk membekali pelajar dengan keahlian kerja yang siap pakai begitu lulus namun kebijakan ini tidak disertai perencanaan yang matang. "SMK pada jaman SBY didorong besar-besaran jadi banyak sekali kita membuka sekolah-sekolah SMK kejuruan. Tapi pembukaan itu tidak direncanakan

dengan baik dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ujarnya saat dihubungi iNews.id, Minggu (11/11/2018). Dengan kebijakan tersebut membuat jumlah sekolah SMK di Indonesia tidak terkontrol didukung dengan banyaknya peminat. Berdasarkan laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, hal ini melahirkan banyak SMK mini yang jumlah siswanya tidak sampai 50 orang. Kemudian, SMK-SMK mini ini juga tidak mampu memberikan fasilitas yang layak bagi siswanya untuk meningkatkan *skill*. Persoalan lainnya tenaga pengajar SMK kebanyakan diisi oleh guru agama dan pancasila ketimbang guru keahlian. Dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang tidak mumpuni ditambah keahlian yang diberikan di sekolah tidak mengikuti kebutuhan industri membuat SMK selama ini menjadi sulit untuk mengembangkan lulusan yang unggul. Hal ini membuat industri tidak dapat menyerap lulusan SMK dengan baik karena tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. “Hasilnya adalah lulusan SMK *supply*-nya jadi banyak, tapi tidak terserap dengan industri karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ucapnya. Oleh karenanya, untuk mengubah hal ini pemerintah harus memperbaiki kualitas SMK yang sekarang kurang tepat. Terutama dengan menyesuaikan keahlian yang diajarkan harus sesuai dengan kebutuhan industri. “Sebenarnya arah dari membangun SMK itu tepat karena yang kita butuhkan adalah tenaga-tenaga yang siap pakai, persoalannya saat ini kualitasnya yang kurang tepat,” ucapnya. Sebelumnya, Mendikbud berjanji akan memperbaiki situasi tersebut. Dalam jangka pendek, perizinan SMK diperketat sehingga jumlahnya bisa melambat. Selain itu, kualitas SMK yang ada akan terus ditingkatkan dengan cara dimerger. “Dengan revitalisasi ini kita coba buat agar ini (SMK) kita merger supaya lebih berbobot sebagai lembaga yang bisa dikembangkan,” ujarnya di, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Dia menambahkan, Kemendikbud juga akan membuat program keahlian ganda bagi para tenaga pengajar SMK. “Kita buat program keahlian ganda. Ternyata hasil kajian kita guru fisika masuk otomotif dia punya dasar dasar dan kita genjot,” tuturnya.



Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 5,28%. Posisi itu menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2018 sebesar 5,34%.

Jika dilihat dari jumlahnya, total orang yang menganggur sebanyak 7,05 juta orang. Lebih tinggi dari posisi Agustus 2018 sebanyak 7,001 juta orang. Kepala BPS Suharyanto mengatakan jika dilihat dari jenjang pendidikan, TPT yang paling tinggi terjadi untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya. Jumlahnya mencapai 10,42%.



“TPT paling tinggi mereka yang berpendidikan SMK. Tapi trennya mengalami penurunan. Jadi perbaikan kurikulum tentu harus terus dilakukan,” ujarnya di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

TPT kedua yang paling tinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,92%. Sementara untuk TPT paling rendah terjadi pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,41%.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, TPT laki-laki mencapai 5,31% secara keseluruhan. Angka itu lebih tinggi dari TPT perempuan yang mencapai 5,23%.



Jakarta, CNBC Indonesia - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia bulan Agustus 2019 turun menjadi 5,28% dibanding tahun lalu yang mencapai 5,34%. Walaupun turun ada beberapa hal yang memprihatinkan, salah satunya TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka TPT bulan Agustus 2019. Berdasarkan jenjang pendidikannya TPT lulusan SD merupakan yang terendah, sementara angka TPT untuk jenjang SMK merupakan yang tertinggi.

Angka TPT lulusan SD bulan Agustus 2019 mencapai 2,41%. Pada periode yang sama angka TPT lulusan SMK justru berada di 10,42%.

Sungguh miris tentunya melihat hal ini karena SMK didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Memang sejak 2017, angka TPT Indonesia mengalami penurunan. Pada 2017 angka TPT SMK Indonesia mencapai 11,41% dan turun di tahun 2019 menjadi 10,42%. Namun, angka TPT tersebut masih di atas 10%.

Saat ini, ekonomi Indonesia di topang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hampir 20%. Namun ironinya, di saat Indonesia di topang oleh sektor industri manufaktur pengolahan, jumlah pengangguran SMK malah tinggi. Padahal seharusnya lulusan SMK banyak diserap di sektor industri manufaktur.

Tim Riset CNBC Indonesia menyoroti adanya isu struktural yang perlu diperhatikan pemerintah terkait dengan fenomena ini. Pertama, walaupun masih disokong oleh sektor industri manufaktur sektor tersier seperti perdagangan dan jasa tumbuh pesat.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan tumbuh 4,75% pada kuartal III-2019 (YoY). Pertumbuhan sektor perdagangan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri yang hanya tumbuh 4,15% pada kuartal III-2019 (YoY). Sektor jasa tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Tercatat pada kuartal III-2019 sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 6,15% (YoY), jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 9,19% (YoY), jasa perusahaan naik 10,22% (YoY) dan jasa lainnya mengalami kenaikan sebesar 10,72% secara tahunan.

Pertumbuhan pada sektor tersier tersebut juga diiringi dengan laju investasi terutama penanaman modal asing (PMA) yang tinggi di sektor perdagangan dan jasa. Sejak tahun 2017 PMA di sektor jasa sudah menjadi sektor dengan realisasi investasi terbesar menggantikan sektor manufaktur.

Perubahan struktural pada ekonomi Indonesia dan tren investasi membuat permintaan tenaga kerja juga berubah. Jika hal tersebut berlanjut maka permintaan tenaga kerja untuk sektor jasa dan perdagangan yang meliputi tenaga pemasar dan tenaga penjual akan meningkat.

Sementara lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja di bagian produksi atau menjadi operator di suatu perusahaan atau pabrik. Artinya ada gap dari sisi *supply* dan *demand* untuk tenaga kerja di sini.

Selain itu, keahlian yang dimiliki oleh lulusan SMK belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Perlu ada koordinasi antara kementerian pendidikan dan kementerian perindustrian serta kementerian ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah ini.

Belum lagi dengan adanya tren revolusi industri 4.0 yang dicirikan dengan era otomatisasi dan era robotik juga berpotensi menjadi ancaman untuk lulusan SMK. Riset lembaga konsultan global McKinsey & Company, menunjukkan bahwa dampak industri 4.0 ini akan menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan dan menciptakan sejumlah lapangan kerja baru

Menurut studi tersebut, ada beberapa aktivitas dan jenis pekerjaan yang dapat diotomatisasi alias digantikan oleh robot di era industri 4.0.

Jenis aktivitas yang nantinya akan digantikan oleh robot adalah aktivitas yang bersifat rutin dan *predictable physical activities* seperti pengumpulan dan pemrosesan data.

Jenis pekerjaan tersebut memiliki potensi untuk digantikan mesin sebesar lebih dari 70%.

Aktivitas pengumpulan data dan aktivitas lain yang bersifat *predictable physical activities* menyumbang 20% dari jam kerja di Indonesia. Sementara itu aktivitas yang melibatkan pemrosesan data berkontribusi 10% dari total jam kerja di Indonesia

Contoh jenis pekerjaan yang melibatkan aktivitas pengumpulan data antara lain legal *support* sementara yang melibatkan pemrosesan data yaitu staf *payroll*. Jenis pekerjaan lain yang juga memiliki ciri-ciri *predictable physical activities* dan berpotensi besar digantikan mesin adalah pekerja di bagian produksi dan operator mesin

Artinya pangsa pekerjaan yang sekarang diisi oleh sejumlah lulusan SMK seperti bagian produksi dan operator berpotensi digantikan oleh mesin. Akibatnya lulusan SMK bisa kehilangan pekerjaan.

Tantangan perkembangan zaman dan pergeseran struktural ekonomi Indonesia

perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah. Tim Riset CNBC Indonesia menyoroti beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

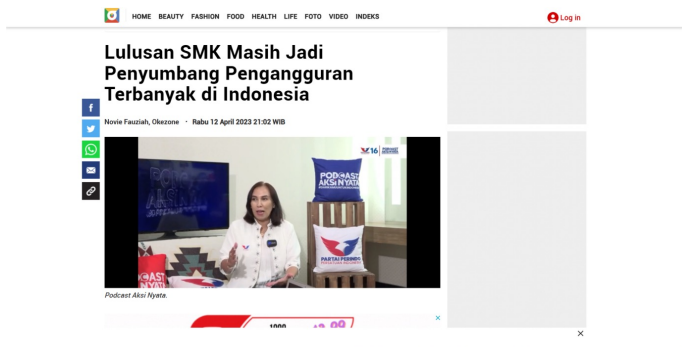
Pertama, penguatan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kerja sama dan koordinasi antar stakeholders diarahkan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan strategi implementasinya.

Kedua, pemerintah perlu mendorong kerja sama antara sekolah dengan perusahaan agar lulusan SMK dapat langsung bekerja sesuai lulus. Langkah ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha untuk mendorong mereka membuat program magang dan pelatihan untuk SDM terutama lulusan SMK.

Ketiga, membuat program pelatihan dan pendampingan dalam rangka *upskilling* dan *reskilling* yang dapat diakses oleh lulusan SMK. Selain itu pemerintah juga perlu mendorong program sertifikasi profesi dan keahlian untuk para lulusan SMK.

Keempat tentu meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru SMK dan juga meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah.



Latar Belakang

Jika merujuk pada pola pemberitaan media massa di Indonesia, isu terkait dengan pengangguran kerap menjadi isu yang diangkat oleh banyak media di Indonesia. Hal tersebut rasanya memang tidak terlalu berlebihan. Pengangguran selama ini memang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar di dunia.

Sebuah survei yang pernah dilakukan oleh BBC World Service pada 2011 juga menyimpulkan hal yang sama. Survei yang dilakukan terhadap 11.000 orang di 23 negara tersebut mengungkapkan bahwa kecemasan terhadap persoalan pekerjaan utamanya terkait kehilangan pekerjaan dirasakan merata di berbagai negara yang menjadi lokasi survei (Survei BBC: pengangguran isu paling mencemaskan dunia - BBC News Indonesia).

Berbicara soal pengangguran dapat merembet ke berbagai bidang, tidak hanya persoalan ekonomi dan kesejahteraan tetapi juga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi atau yang juga dikenal sebagai pendidikan kejuruan merupakan jenis pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan teknis dalam suatu bidang kerja tertentu. Berbeda dengan pendidikan formal seperti perguruan tinggi akademik atau sekolah menengah umum, pendidikan vokasi lebih menekankan pada penerapan langsung di dunia kerja.

Meskipun isu terkait pengangguran di media massa sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sejak awal dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, isu pengangguran selalu dikait-kaitkan dengan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Ada harapan besar yang dibangun masyarakat bahwa



pendidikan vokasi memiliki peran yang penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Melalui pendidikan vokasi, para peserta didik dapat mendapatkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Oleh banyak pihak, Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi pun dinilai menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk dapat menekan angka pengangguran karena mampu mentransformasikan pendidikan vokasi di Indonesia hingga dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang mumpuni yang dibutuhkan di dunia kerja. Tidak hanya itu, kemampuan berwirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa/siswa vokasi juga digadang menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia.

Akan tetapi, Badan Pusat Statistik (BPS) kerap mengeluarkan hasil-hasil survei yang justru bertentangan dengan harapan masyarakat. BPS banyak menyajikan data tentang tingginya angka pengangguran yang justru berasal dari lulusan pendidikan vokasi di Indonesia.

Sebagai contoh misalnya, berita yang diangkat oleh www.okezone.com pada 12 April 2023. Berita tersebut mengulas tentang persoalan pengangguran dari lulusan SMK yang masih tinggi. Situs tersebut mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022, di mana jumlah penganggur

terbuka lulusan vokasi tahun 2022 mencapai 1,8 juta orang atau 22 persen dari total penganggur. Jumlah terbanyak disumbang lulusan SMK jika dibandingkan lulusan diploma satu (D-1), diploma dua (D-2), dan diploma tiga (D-3).

Sayangnya, data Sakernas 2022 seolah mengulang pola-pola yang sama dengan data tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia masih didominasi oleh lulusan vokasi. Bahkan, laporan serupa juga menjadi topik hangat pada pemberitaan media jauh sebelum Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dibentuk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terbuka Agustus 2018 sebanyak 7 juta orang. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbanyak yaitu sebesar 11,24 persen sedangkan Sekolah Menengah

Atas (SMA) sebesar 7,95 persen. (Inews/2018)

Dengan pola pemberitaan yang seolah terus berulang hampir di setiap tahunnya, maka narasi pemberitaan tentang lulusan pendidikan vokasi sebagai penyumbang pengangguran di Indonesia mungkin bisa disamakan seperti narasi pemberitaan tentang kenaikan upah minimum regional (UMR) bagi pekerja.

Isu-isu kenaikan UMR biasanya akan terus berulang setiap tahunnya dengan pola yang bisa diprediksi setiap tahun, utamanya dari segi waktu. Misalnya saja, isu terkait kenaikan UMR yang biasanya akan muncul di akhir tahun atau menjadi bahasan hangat media saat Hari Buruh (1 Mei).



Sedikit berbeda dengan isu kenaikan UMR, biasanya isu terkait dengan pengangguran lulusan SMK akan muncul segera setelah BPS mengeluarkan rilis terkait angkatan kerja di Indonesia.

Peristiwa

Pemberitaan terkait isu pengangguran dan lulusan vokasi tidak sama seperti pada contoh kasus-kasus sebelumnya. Pada umumnya, pemberitaan terkait dengan pengangguran dan lulusan SMK atau perguruan tinggi vokasi akan muncul bersamaan dengan rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara berkala biasanya BPS akan mengeluarkan survei terkait dengan angkatan kerja secara nasional, dimana didalamnya memuat tentang tingkat pengangguran terbuka.

Pada umumnya, di hari yang sama ketika BPS merilis hasil surveinya, media akan langsung merespons dengan menurunkan berita terkait isu pengangguran. Isu ini biasa diangkat karena pengangguran memang menjadi isu yang cukup sensitif dan menyangkut pada kepentingan masyarakat.

Beberapa media mungkin ada yang tidak terlalu frontal dalam menjadikan isu pengangguran dan lulusan vokasi sebagai *headline* mereka. Akan tetapi, isu vokasi dan pengangguran akan tetap masuk dalam radar pantauan media karena masyarakat pasti ingin mengetahui lebih detail penyebab pengangguran.

Tidak jarang isu ini malah diangkat dalam program-program *talkshow* di stasiun televisi, radio, dan sebagainya. Dengan demikian, akan sulit bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menghindari topik ini dan isu mulai bergulir menjadi krisis yang bisa mengancam reputasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Pembaruan Peristiwa

Pemberitaan terkait dengan pengangguran dari lulusan vokasi sejatinya tidak hanya baru-baru ini saja. Jika menilik ke belakang, berita soal lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran bahkan sudah ada jauh sebelum program Revitalisasi SMK dilakukan sejak 2016 lalu. Program Revitalisasi SMK sendiri menjadi bagian dari transformasi pendidikan SMK, di mana salah satunya diharapkan bisa menekan angka pengangguran SMK.

Akan tetapi, berita serupa tentang pengangguran dari SMK juga terus berulang dan menjadi topik yang hangat dan selalu diangkat oleh media, baik cetak, *online*, maupun media televisi hingga saat ini. Meskipun ketika berbicara tentang pengangguran akan melibatkan banyak faktor, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas transformasi terhadap pendidikan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kerap menjadi pihak yang disudutkan manakala berita seputar pengangguran dari SMK naik dan menjadi perbincangan publik.



Dampak Berita dan Level Krisis

Tuntutan yang berlebihan agar lulusan SMK bekerja sebenarnya tidak pada tempatnya. Hal tersebut setidaknya didasarkan pada sejumlah alasan. Salah satunya adalah bahwa baik World Health Organization (WHO) maupun Kementerian Kesehatan masih menempatkan usia 18 tahun sebagai kategori remaja yang sedang bertumbuh kembang. Pada usia tersebut, seseorang masih harus ditempatkan sebagai pembelajar kehidupan.

Oleh karena itu, bisa dikatakan jika isu terkait pengangguran SMK merupakan sebuah serangan yang juga kurang terlalu relevan untuk diarahkan kepada organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jika merujuk pada Buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), pada dasarnya serangan, keluhan, atau kritik adalah kejadian umum dalam interaksi manusia, termasuk dalam hal ini adalah serangan/keluhan dan kritik yang kerap dialamatkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui narasi pemberitaan terkait penggunaan SMK.

Meskipun demikian, dengan intensitas pemberitaan yang cukup tinggi dan kerap diangkat menjadi perbincangan di ruang-ruang publik, membuat pemberitaan terkait pengangguran lulusan vokasi, khususnya SMK menjadi sebuah sentimen negatif yang memberikan dampak pada citra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis) menyebutkan bahwa ancaman terhadap citra memiliki dua komponen, yakni tuduhan dan ketidaknyamanan. Dalam hal ini, dampak pemberitaan pengangguran lulusan SMK terhadap organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bisa berupa tuduhan dan ketidaknyamanan.

Pemberitaan yang masif terkait pengangguran lulusan SMK bisa saja mengarah masyarakat pada tuduhan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi belum terlalu maksimal dalam setiap program-program yang dikeluarkan dalam rangka mentransformasikan pendidikan vokasi di SMK sehingga lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya bisa terserap industri dan banyak yang menganggur.

Tuduhan dari masyarakat tersebut tentu dapat menjadi pemicu ketidaknyamanan bagi organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ketidaknyaman ini tentu saja terkait dengan kepercayaan publik yang bisa saja menurun.

Suka tidak suka, pemberitaan terkait dengan pengangguran dari lulusan SMK yang masif dapat menjadi pemicu krisis bagi organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Akan tetapi, jika merujuk pada level krisis sebagaimana ditulis dalam buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis), level atau tingkat krisis terkait pemberitaan bisa mengarah pada kategori rendah hingga berat.



Saat berita terkait dengan pengangguran dari lulusan SMK ini hanya menjadi rilis yang dikeluarkan oleh BPS maka bisa jadi dampak berita tersebut tidak akan berpengaruh terhadap organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Bisa saja berita tersebut hanya menjadi isu di komunitas-komunitas tertentu saja, misalnya di level tataran pengambil kebijakan.

Akan tetapi, ketika berita terkait pengangguran dari lulusan SMK tersebut mulai menjadi pemberitaan masif di media sosial, menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang publik, dibawa ke *talkshow* di stasiun televisi, dan sebagainya maka level krisis bisa meningkat menjadi berat.

Peningkatan level krisis tersebut terjadi manakala dampak dari pemberitaan masih tentang pengangguran dari lulusan SMK mulai memengaruhi seluruh komunitas dan mempengaruhi masyarakat. Misalnya adalah isu tersebut berdampak pada penurunan minat peserta didik atau orang tua untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah vokasi.

Spread the Good News

Sejatinya, krisis mempunyai dua peluang bagi organisasi, yakni sebagai *entry point* untuk meningkatkan citra atau sebagai *entry point* untuk kehilangan citra. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk melakukan manajemen isu dan krisis dengan baik sehingga muara akhir dari krisis dapat meningkatkan citra dari reputasi publik terkait organisasi tersebut.

Manajemen krisis diutamakan bagi isu-isu yang selalu berpotensi berulang, dalam hal ini adalah seperti isu terkait pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi ini (lulusan SMK). Isu ini selalu berulang dan menjadi berita-berita yang banyak dicari oleh masyarakat.

Isu terkait pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi jika dicermati juga memiliki pola pengulangan yang relatif hampir sama. Isu ini biasanya akan muncul seiring dengan pemberitaan terkait rilis hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angkatan kerja. Biasanya para wartawan akan lebih menyukai untuk menampilkan data terkait pengangguran terbuka.

Dengan melihat pola dan sumber yang selalu berulang, maka langkah terbaik mengatasi krisis terkait dengan pemberitaan yang terus berulang menyangkut pengangguran lulusan SMK ini adalah dengan membuat sebuah rencana antisipasi krisis. Rencana antisipasi krisis biasa disebut perencanaan isu (*issue plan*) atau manajemen isu. Perencanaan isu untuk mencegah krisis ini penting karena pada dasarnya sebuah krisis akan terjadi jika organisasi gagal memonitor isu. Akibatnya, isu menjadi meluas atau bahkan bisa memicu ketidakpuasan publik hingga kemarahan publik.

Dalam kasus isu terkait dengan pengangguran dan lulusan pendidikan vokasi (SMK) jika tidak dikelola dengan baik, isu ini tentu saja bisa mengundang kekecewaan publik.



Kekecewaan lahir karena harapan publik bahwa pendidikan vokasi bisa menjadi solusi pengangguran, tetapi berdasarkan laporan dari BPS setiap tahunnya justru mengatakan kebalikannya. Penyumbang pengangguran terbesar justru dari lulusan pendidikan vokasi.

Melindungi instansi atau organisasi dari kritik-kritik spekulasi yang biasa muncul dari diskursus publik di media massa, bersifat dapat dipercaya, keterbukaan, dan komunikasi berbasis keseimbangan. Desain tersebut penting untuk meminimalkan kerusakan reputasi organisasi.

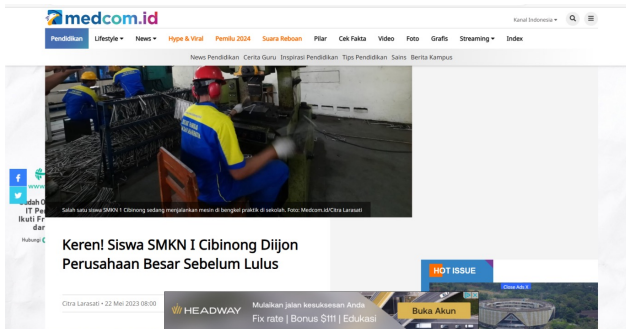
Reputasi dapat diartikan sebagai evaluasi publik tentang kualitas organisasi dalam memenuhi harapan-harapan publik. Sebagai sebuah aset yang bernilai dan sangat bersifat *intangible* (tidak terlihat secara fisik), reputasi ini perlu diselamatkan saat krisis terjadi.

Reputasi terbentuk dari berbagai informasi yang diterima publik karena sifatnya yang evaluatif. Beberapa sumber informasi yang digunakan publik antara lain dari berita-berita media massa, dari percakapan dengan teman-temannya, diskusi publik di jejaring sosial di internet, atau dari organisasi itu sendiri.

Dari hal tersebut, publik memiliki kesempatan untuk membanding-bandingkan berbagai informasi tersebut. Jika kebijakan organisasi untuk merespons krisis tidak memenuhi

harapan publik maka reputasi organisasi dapat terancam.

Harapan bisa dibangun melalui sejumlah pemberitaan yang bisa memenuhi harapan publik. Misalnya adalah berita yang menggambarkan bagaimana keberhasilan pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran, berita lulusan SMK yang langsung diserap industri setelah dia lulus, lulusan pendidikan vokasi yang membuka lapangan usaha dengan berwirausaha, dan berbagai narasi positif lainnya.





Kesimpulan

Dalam buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis) disebutkan bahwa peran utama dari komunikasi krisis adalah memengaruhi proses opini publik dan berperan dalam membentuk dan menyampaikan bukti bahwa “kebenaran” yang berlaku tidak berdasar pada fakta atau tidak sepenuhnya berdasar fakta. Peran utama dari komunikasi krisis juga berkaitan dengan bagaimana membangun citra positif kembali.

Berdasarkan implementasi dalam kasus pemberitaan tentang pengangguran dari lulusan SMK maka organisasi perlu memetakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan, seperti apakah publik mengetahui semua fakta, beberapa fakta, setengah kebenaran, atau malah kebohongan? Seseorang harus tahu di mana posisi publik ini berdiri sebelum mereka dapat menjadi sasaran komunikasi.

Individu, kelompok, dan organisasi memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan penting adalah menjaga reputasi yang baik. Perilaku yang sebenarnya atau yang dipercayai bisa memalukan, bisa mengurangi kredibilitas kita (ketika mencoba memperbaiki citra atau ketika mencari tujuan lain), dan bisa mendorong orang lain untuk bersikap tidak menguntungkan terhadap kita.

Membangun narasi yang positif sebagai penyeimbang isu-isu negatif yang beredar di masyarakat menjadi salah

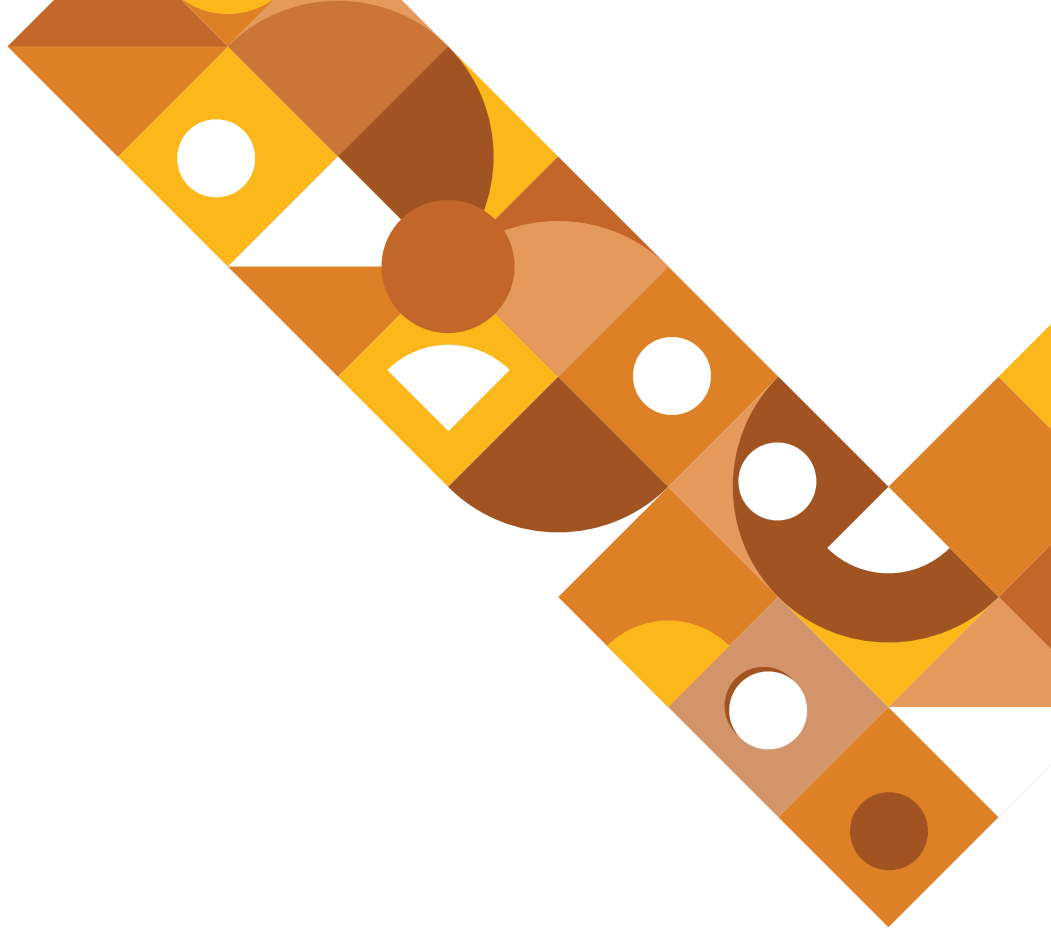
satu strategis dalam implementasi teori perbaikan citra sebagaimana disebutkan dalam buku Komunikasi Krisis (Sebuah Kajian Teoritis). Menyebarkan berita-berita baik sebagai narasi yang positif juga menjadi strategi yang cukup mudah diambil saat menghadapi situasi krisis yang berulang. Jadi, tetapkan potensi krisisnya dan siapkan “amunisi” untuk disebar di waktu yang tepat.





**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

2023



**Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI